



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU SDG 14
INDONESIA EMAS

KKP
2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN I
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode triwulan I tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 15 April 2025

Ht. Kepala Balai Besar KIPM Makassar



Rahayu Setyaningsih





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	7
3. Sasaran , Indikator dan Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
1. Capaian Kinerja	10
2. Analisis dan evaluasi	12
IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	13
IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	23
IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	31
IK4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	35
IK5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	40
IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	48
IK7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	52
IK8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	58
IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	64
IK10. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	70



IK11. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	74
IK12. Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	84
IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	89
IK14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	92
IK15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	96
IK16. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	102
IK17. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)	109

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	118
2. Rekomendasi	118
3. Tindak lanjut	119



LAMPIRAN

Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

IK1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	1
IK2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	11
IK3.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	20
IK4.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	23
IK5.	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	27
IK6.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	35
IK7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	39
IK8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	43
IK9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	48
IK10.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	53
IK11.	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	56
IK12.	Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	63
IK13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	66
IK14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	69
IK15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	77
IK16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	82
IK17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)	87



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 112,41 (Istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Dari 17 (Tujuh belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025 ada 4 Indikator Kinerja yang baru yaitu : 1) Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar , 3). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
- B. Uraian Indikator Kinerja Utama KU yang capainnya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :
 - I. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)



2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, (%)
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)
5. Nilai kinerja Kinerja-Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (%)
7. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 11,879,526,000 dan realisasi Rp 2,637,863,723 atau 22,21%



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja.



Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas dan Struktur Organisasi Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Lokasi Pengawasan Mutu hasil eklautan dan perikanan sektor prosuksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan sektor produksi pasca panen lingkup UPT



- Balai Besar KIPM Makassar, 5) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1). Nilai kualitas penerapan sistem mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang didukung 1). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 5). Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 7). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 8). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 9). Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM, 10). Survey Kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

1.4 Sistematika dan penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;



- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2 Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Besar KIPM Makassar telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

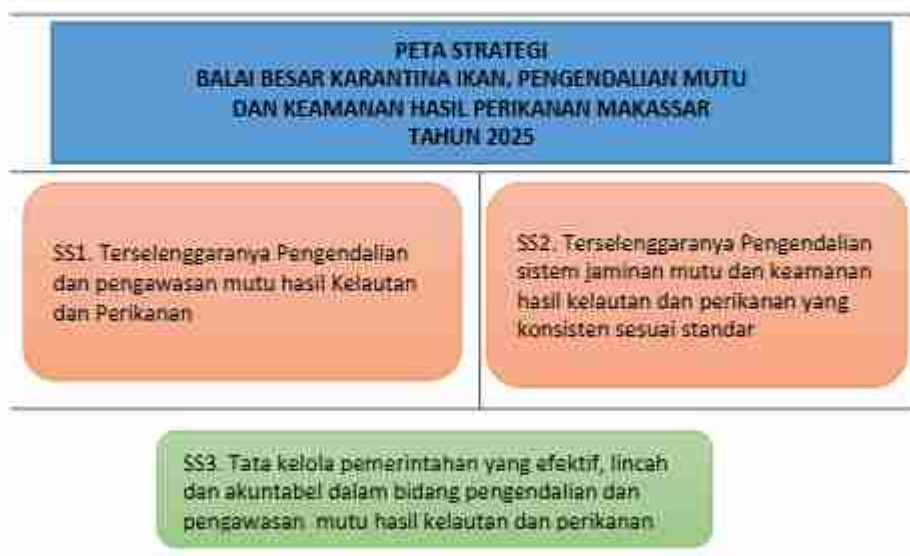
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |

3.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2024 - 2025					Tahun 2025				
		2024	2024	2025	2025	2025	Target 2025	Target Triwulan 2025	Realisasi Triwulan 2025	5. Realisasi Terkumulatif Target Triwulan 2025	6. Realisasi Terkumulatif Target Tahun 2025
Peningkatan Regenerasi dan Pengawasan Industri Hasil Industri Perikanan	1. Persentase hasil produksi dari Perikanan hasil produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan dengan input UPT Balai Besar KIPM Makassar	+	+	+	+	100	75	75	100	100.00	100.00
	2. Persentase hasil produksi dari perikanan hasil produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan dengan input UPT Balai Besar KIPM Makassar	+	+	+	+	80.0	75	75	100	100.00	100.00
	3. Jumlah Pengawasan Industri Hasil Perikanan Sektor produksi primer dengan input UPT Balai Besar KIPM Makassar						0	0	0	0.00	0.00
	4. Jumlah Pengawasan Industri Hasil Perikanan Sektor produksi pasca panen dengan input UPT Balai Besar KIPM Makassar	+	0	0	0	100	0	0	0	100.00	100.00
	5. Data Sampel dan hasil pemeriksaan yang diterima dari negara bagian ekspor dengan input UPT Balai Besar KIPM Makassar	+	00.00	00.00	100.00	100	00	00	100	100.00	100.00





LAPORAN KINERJA 2025

Strategi Utama	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2023 - 2025					Tahun 2025				
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2025	Target TA 2025	Realisasi TA 2025	% Realisasi terhadap Target TA 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Terdorongnya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kegiatan dan pelayanan yang konsisten sesuai standar	6. Nilai Pemenuhan persentase sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan kegiatan inspeksi lingkup Sisi Besar KPM Makassar	-	-	-	-	85.1	75	8	8	0.00	0.00
	7. Nilai kualitas pengawasan sistem manajemen mutu kegiatan inspeksi lingkup UPT Sisi Besar KPM Makassar	-	-	-	-	-	75	8	8	0.00	0.00
Terdorongnya kinerja kesehatan yang efektif, efisien dan optimal dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kegiatan dan pelayanan	8. Nilai indikator pelaksanaan kegiatan (KPA) lingkup Sisi Besar KPM Makassar	88	89	88.44	88.88	87.18	85	85	100	100.00	100.00
	9. Nilai kinerja Pemantauan Anggaran lingkup Sisi Besar KPM Makassar	-	88	87.67	88.2	88.17	71.5	71.5	100	100.00	100.00
	10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sisi Besar KPM Makassar	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00	100.00
	11. Indeks Kepuasan RSP lingkup Sisi Besar KPM Makassar	88.01	87.44	87.23	87.07	87.08	87	8	8	0.00	0.00
	12. Nilai Pemenuhan Mandiri SAKP lingkup Sisi Besar KPM Makassar	91.55	88	85.3	87.12	85.8	88	8	8	0.00	0.00
	13. Persentase ketermampuan hasil pengawasan yang difasilitasi dan pertukaran kinerja	81	83	100	100	100	85	85	100	117.65	117.65
	14. Tingkat kepatuhan pengujian laboratorium lingkup Sisi Besar KPM Makassar	-	-	79.58	78.26	84.34	76	0	0	0.00	0.00
	15. Nilai minimal yang diharapkan untuk pengembangan unit kerja kesehatan keluarga	-	-	-	-	-	75	8	8	0.00	0.00
	16. Indeks Pelayanan Publik lingkup UPT Sisi Besar KPM Makassar	-	-	-	-	-	1	8	8	0.00	0.00
	17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sisi Besar KPM Makassar	-	-	88.8	87.12	87.77	88	88	88.21	100.00	100.00





3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capain kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut Indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperlukan dukungan 5 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 5 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 70 %
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 1 Lokasi
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 1 Lokasi
5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 99 %



IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2028	
		2020	2021	2022	2023	2024	Tujuan 2025	Tujuan TII 2025	Realisasi TII 2025	% Realisasi Tertentu Target TII 2025	% Realisasi Tertentu Target Tahun 2025	Tujuan 2025	% Capaian Target Rencana
Terselenggaranya Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	100	70	70	100	140,59	140,59	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

BBPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan



upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.





Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Jumlah Unit menerapkan CPiB
C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPiB
D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOiB
E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOiB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPiB Kapal
Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk





Adapun target sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 sertifikat. untuk memudahkan pencapaian target tersebut dibagi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Capaian Per Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Sertifikasi CPIB Kapal	0	3	2	0
2	Sertifikasi CBIB	1	1	1	0
3	Sertifikasi CPIB	0	1	1	1
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0	2

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi sertifikasi CBIB sebanyak 1 sertifikat dari target 3 sertifikat. Sedangkan realisasi sertifikasi CPIB Kapal, CPIB Pembenihan dan CPPIB Pakan pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 0 sertifikat dari total target sebanyak 10 sertifikat. Dengan demikian persentase dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{3} \times 100\% = 100\% \\
 \%X &= \frac{A}{xn} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{1} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Sertifikat CBIB ditriwulan I tahun 2025

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1.	CV SENADA HORTA	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	B	ID-CBIB-P-73-250012- Tanggal 07 Februari 2025





Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaotu :

- Pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal
- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu : Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Kegiatan CBIB dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di CV. Senada Horta Jl. RAJAWALI NO. 37, Desa/Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu BPPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sesuai dengan kode KBLI 03254 yaitu komoditi Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*).
- Pada tanggal 19 Februari 2025 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi terhadap seluruh UPT BPPMKHP terkait SOP Pelaksanaan Sertifikasi pada Sektor Produksi Primer yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Maret 2025 telah dilaksanakan sharing session dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di BPPMHKP Makassar, sharing session ini menjadi wadah bagi setiap penanggung jawab kegiatan teknis untuk memaparkan pedoman teknis yang relevan, sejalan dengan amanat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan





serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian.

- Pada tanggal 17 – 18 Maret 2025 telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal oleh Pusat Mutu Produksi Primer, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPPMHKP Makassar diperoleh nilai total atas konsistensi pemenuhan Penerapan Persyaratan Teknis dengan jumlah 97,44 % dengan peringkat sangat baik, kegiatan dilanjutkan dengan bincang inspiratif tentang Strategi Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal diharapkan seluruh peserta dapat berbagai pengalaman, tantangan serta solusi yang implementasi kebijakan terkait sehingga tercipta harmonisasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang lebih baik.
- Pada tanggal 18 Maret 2025 telah dilakukan kegiatan pemantapan persiapan pelaksanaan inspeksi dan surveilan tahun 2025 khususnya dalam rangka penerbitan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOIB) terhadap seluruh UPT BPPMKHP yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CBIB pada TW I sebanyak 2 orang yang terdiri dari 2 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.



Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	18.820.000	-	18.820.000
JUMLAH		18.820.000	-	18.820.000





Akar masalah

- Unit Pembenihan Rakyat dan Unit Pembesaran Rakyat belum familiar dengan aplikasi OSS sehingga berdampak dalam melakukan permohonan pengajuan sertifikasi.
- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPiB Kapal perikanan.
- Sehubungan dengan tindak lanjut Plan of Action dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa BPPMHKP Makassar mendapatkan target 133 kapal yang harus disertifikasi paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun 2025 namun sebanyak 88 kapal belum memiliki bimtek CPiB, 3 kapal yang mensuplai ke PT. Prima Indo Tuna sudah memiliki bimtek namun berdasarkan informasi kapal tersebut akan melakukan pembongkaran ikan kembali di PPI Lappa sinjai pada bulan 12 tahun 2025 – bulan Maret tahun 2026, sebanyak 42 kapal PT. Ocean Champ Seafood yang merupakan kumulatif dibawah 5 GT berdasarkan informasi dari pusat primer belum bisa dilakukan inspeksi dikarenakan Permen KP terkait CPiB Kapal belum terbit.

Rekomendasi rencana aksi :

- Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di propinsi Sulawesi selatan dan para penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka pendampingan ke UPR yang akan mengajukan sertifikasi melalui OSS;
- Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis;
- Melakukan penundaan sertifikasi terhadap 42 kapal yang mensuplai ke OCS dimana kapal tersebut berukuran ≤ 5 GT sampai menunggu Permen KP terkait CPiB Kapal diterbitkan.



Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal



Kegiatan Koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggungjawab PP Untia





Kegiatan Inspeksi Cara Budidaya Ikan yang baik dengan CV. Senada Herta



Kegiatan Sharing Session Pedoman teknis pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan



Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi Cara Perangai Ikan Yang Baik (CPB) Kapal

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Berkas Tahun 2023 - 2024					Tahun 2024					Berkas Hasil Sertifikasi Kelautan dan Perikanan 2024 - 2025	
		2023	2024	2023	2024	2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024
Tingkat pengendalian Sanitasi dan Keamanan Pangan Pasca Panen	0					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SIKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan I 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)



2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan; kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.



CARA PENGUKURAN

Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xN} \times 100\%$$

Dimana

XI = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan BMPSSOP
N = Total dari unsur pembentuk (3)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW I 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	49	83	169,38%
2	Sertifikasi SKP (B)	102	62	60,78%





Catatan :

1. Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 169,38% karena terdapat permohonan baru dan penambahan ruang lingkup produk.
2. Realisasi sertifikasi SKP hanya mencapai 60,78% karena terdapat 40 rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{169,38 + 60,78}{2} \\ &= 115,08 \%\end{aligned}$$

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 115,08 %, dari target 70 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 164,40 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP akan segera melakukansertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval NumberUE. Sertifikasi tersebut sebagai





bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 151.804.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 58.196.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.22.365.000,- atau sebesar (38,43%).

Akar masalah

- Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran, sebagian kegiatan sertifikasi SKP harus dilakukan dengan mekanisme virtual. Hal ini berpotensi terhadap kurang optimalnya hasil inspeksi mengingat lokasi unit pengolahan masih baru dan belum ada gambaran kondisi yang sebenarnya secara langsung.





- Pelaksanaan Sertifikasi SPDI akan dilaksanakan jika pihak pemasok/supplier harus terlebih dahulu menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis yaitu Direktorat Penguatan Daya Saing (PDSKP) sehingga untuk melaksanakan kegiatan SPDI harus menunggu penilaian CDIB terlebih dahulu;

Rekomendasi rencana aksi

- Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik.
- Melakukan komunikasi secara intensif dengan calon pemasok dan Direktorat teknis (PDSPKP) sebagai pelaksana penilaian CDIB dalam rangka percepatan sertifikasi SPDI;

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

- Berkolaborasi dengan petugas verifikasi SKP pada dinas perikanan tingkat satu agar persyaratan sebelum penerbitan rekomendasi dinas sudah terpenuhi terlebih dahulu mulai dari awal tahun 2025.
- Telah dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;
- Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;



- Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara daring pada tanggal 13 maret 2025.



Kegiatan Inspeksi Konstansi penerapan HACCP di UPI



Kegiatan Inspeksi Kondisional Sertifikat Kelayakan Pengolahan di UPT

IK.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2022 - 2023					Tahun 2023					Rencana Dasar (RP) Makassar 2023 - 2025	
		2022	2023	2023	2023	2023	Target 2023	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi 2023	% Realisasi 2023	Target 2023	% Realisasi 2023
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						9	9	9	100	100	9	9



Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

1. Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
2. Pengambilan Contoh : uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb*, *Cd*, *Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli*, *Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoksine* dikarenakan





pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I tahun 2025 kegiatan monitoring cemaran perairan belum dilaksanakan oleh BPPMHKP makassar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer pada tanggal 19 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP. Pada kegiatan tersebut Pusat Mutu Produksi Primer menyampaikan target lokasi monitoring cemaran perairan untuk BPPMHKP Makassar sebanyak 1 (satu) lokasi, yaitu Perairan Makassar.

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 8 orang yang terdiri atas 6 orang Inspektur Mutu dan 2 orang Asisten Inspektur Mutu.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung program prioritas KKP. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang dikonsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun hayati laut dan logam berat.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- di blokir sebesar Rp. 5.340.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 4.660.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.380.000,- atau sebesar (8,15%) yang digunakan untuk pembelian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik sisa anggaran sebesar Rp. 4.280.000,-

Sebagai perbandingan, anggaran pada Anggaran kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 92.000.000,- yang terealisasi pada Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 1.090.000 atau sebesar (1,18 %) yang terdiri dari pembelian sampel uji.



Dari jumlah pagu anggaran Tahun 2025 terjadi penurunan anggaran, sedangkan dari realisasi anggaran jika dibandingkan antara triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran disebabkan nilai anggaran tahun 2024 lebih besar dari anggaran tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Akar Masalah

Potensi masalah petugas/pelaksana kurang memahami ketentuan yang berlaku terkait monitoring cemaran perairan.

Rekomendasi rencana aksi

Melakukan Sosialisasi / Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif.

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi

Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya



Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengendalian Mutu Produksi Primer
Pada tanggal 19 Februari 2025



IK 4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Isu Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022-2024					Tahun 2025					Rencana Tahun 2025-2026	
		2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
		2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
Penyempurnaan Regulasi dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	0	0	0	0	1	1	1	100,00	100,00	-	-

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.





2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pascapanen pada tanggal 18 Februari 2025 yang dihadiri oleh UPT BPPMHKP secara virtual. Pusat Mutu Pascapanen melakukan pembahasan kegiatan tahun 2025, yang bertujuan untuk berkoordinasi, berdiskusi, persamaan persepsi antara Pusat dan UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada triwulan I tahun 2025 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kota Makassar dengan lokus pengawasan yaitu Pasar Tradisional Daya.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional Daya.





2. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di Pasar Tradisional Daya, terdapat 5 sampel yaitu cumi-cumi segar, ikan bandeng segar, ikan katamba segar, ikan kerapu segar dan udang vannamei segar. Telah dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, dan Formalin. Dari hasil pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene pada pasar tradisional Daya. Setelah dilakukan pengamatan pasar tradisional Daya memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana lokasi berada ditempat bebas pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat, saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu, transportasi pengangkutan produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga.

Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 sebesar Rp. 31.500.000,- Anggaran indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.





Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 77.240.000,- yang terealisasi pada TW I tahun 2024 sebesar Rp. 10.671.929,- atau 13,82%.

Pada triwulan I tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memastikan ketersediaan ikan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat, melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan I tahun 2024 adalah 10 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), BPPSDMKP Maros dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Akar masalah

Potensi masalah: Berupa pemahaman pelaku usaha terkait cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene masih kurang yang memungkinkan penurunan mutu ikan yang di pasarkan.

Rekomendasi rencana aksi

Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu semester II.

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025.

1. Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi



Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2025 di Pasar Tradisional Daya Kota Makassar



IK 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Rencana Tahun 2020-2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target T1 2025	Rencana T2 2025	Rencana Sertifikasi Target T1 2025	Rencana Sertifikasi Target Tahun 2025	Target 2025	Rencana Sertifikasi Target Tahun 2025
Terwujudnya Penguasaan dan Penguasaan Mutu Hasil Keluaran dan Penguasaan	5. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	95,98	99,99	100,00	99	99	100	100,00	100,00	-	-

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka



penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan

sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.





Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

$$A = \frac{\text{Jumlah HC ekspor (K1-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Pada triwulan I tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 45,04 ton senilai Rp. 1,53 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 2.798 sertifikat. Adapun pada triwulan I tahun 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47,932 ton senilai Rp. 1,68 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.444 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah sertifikat ekspor sebesar 12,65 % di triwulan I tahun 2025. Hal ini berbanding terbalik dengan volume ekspor yang mengalami penurunan di triwulan I tahun 2025 jika dibandingkan triwulan I tahun 2024 sebesar 6,03%.





Data pada triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2024 terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan berupa *Frozen Flying Fish Roe* sebanyak 1 container dengan volume 12.000 Kg/1200 carton tujuan negara Taiwan. Penolakan disebabkan karena ketidaksesuaian jenis produk dengan permintaan buyer. Penolakan ini tidak masuk dalam kategori kasus penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Berdasarkan formula penghitungan IKU, Komponen A tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan disebabkan sejak awal tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur organisasi, dimana sertifikat Kesehatan Ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, sehingga

B : Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan
x 100%

Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan

$$\frac{2.798 - 0}{2.798} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan I tahun 2025 adalah 100%. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara Triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2025 yaitu 100 %;

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu sebanyak 18 orang serta didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 12 orang dan PJLP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.





Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan peralihan aplikasi pelayanan sertifikasi dari Sisterkaroline (Sistem Komputerisasi Karantina Ikan dan Mutu Online) ke aplikasi SIAP MUTU (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu). Aplikasi SIAP MUTU telah diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2025 dan diharapkan dapat mengakomodir pelayanan sertifikasi mutu dan penjaminan mutu hulu hilir. Selain itu, telah dilakukan kegiatan piloting dan sosialisasi aplikasi SIAP MUTU kepada pelaku usaha.

Kegiatan peningkatan kompetensi untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebaga berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	5 Januari 2025
2.	Sosialisasi Penerbitan SMKHP Melalui Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	22 Januari 2025
3.	Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	27 Februari 2025
3.	Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	28 Februari 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Evaluasi kesesuaian penerbitan HC
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.



Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW I 2025	Persentase Realisasi
1	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

Akar masalah

- Masih relatif tingginya permintaan revisi SMKHP oleh pengguna jasa.
- Terdapat kegiatan pendukung IKU berupa evaluasi kesesuaian penerbitan HC yang masih baru dan belum dilakukan sosialisasi pelaksanaannya.





Rekomendasi rencana aksi

- Melakukan penyadartahuan/edukasi/sosialisasi tentang ketentuan revisi SMKHP melalui penilaian kepatuhan pelaku usaha.
- Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang kegiatan evaluasi kesesuaian penerbitan HC dan detail pelaksanaannya.

Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

- 1) Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut :
 - a. Sharing Session Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang salah satu agendanya membahas Sosialisasi Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025.
 - b. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari 2025.
 - c. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU bersama pelaku usaha/eksportir produk perikanan tujuan China pada tanggal 25 Maret 2025.
- 2) Telah dilakukan kordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada tanggal 22 Januari 2025 pasca kegiatan Rapat Relokasi Blokir oleh Sekretariat BPPMHKP.



Sharing Sesiort Pedoman Teknis Pengendalian dan Penguasaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Tanggal 3 Maret 2025

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 1 Indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 2 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar	
1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar	1. 75 Nilai
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 75 Nilai



**IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup
UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Kualitas Tahun 2023 - 2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2026	
		2023	2024	2025	2026	2027	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025	Kualitas Indikator Tahun 2025	Kualitas Indikator Tahun 2025	Tahun 2025	Kualitas Indikator Tahun 2025
Peningkatan Efektivitas sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai Besar KIPM Makassar	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	75	8	8	100	100	-	-

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical



Control Points (HACCP). Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 94 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah pula dilakukan Sharing Session pedoman teknis pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025 di Aula Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar untuk meningkatkan pemahaman inspektur mutu dalam pelaksanaan kegiatan surveilan HACCP.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \text{Rata-rata} \\ x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n &= \text{Nilai tingkat pemenuhan ke } 1, 2, 3, \dots, n \\ n &= \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan} \end{aligned}$$

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi





Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar Rp. 3.500.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- atau menurun sebesar 82,5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu belum direalisasikan sama sekali. Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II berupa iuran tahunan sebanyak Rp. 1.500.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- berupa anggaran pertanggungjawaban jika terdapat kesalahan dalam kegiatan surveilan yang mengakibatkan kerugian pada auditi.

Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi oleh Pusat Manajemen Mutu. Untuk itu pada Triwulan I Tahun 2025 ini Balai Besar KIPM Makassar belum memperoleh nilai penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Akar masalah

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Rekomendasi rencana aksi

Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi

Status akreditasi sistem manajemen mutu lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 tetap dipertahankan dengan melakukan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 pada kegiatan operasional Balai Besar KIPM Makassar.



Kegiatan Sertifikasi penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012



IK7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Rencana Tahun 2023 - 2024					Tahun 2025					Rencana Tahun 2026	
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2025	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi 2026	Target 2025	Target 2026	Realisasi 2025
Tertinggi Pengembangan pemerintahan dan kelembagaan	7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup JPT Balai Besar KIPM	-	-	-	-	-	75	80	80	80	80	80	-

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:



1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$\bar{x}$ = Rata-rata
 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n
 n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 3.751 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 1.056 kali
2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.790 kali
3. Pengujian Kimia sebanyak 683 kali
4. Pengujian Air dan Es sebanyak 222 kali

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.





Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar 36.537.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- atau menurun sebesar 47,8% dari anggaran tahun sebelumnya.

Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 1.500.000,- atau sebesar 4,1 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 35.037.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II, III, dan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, uji banding, dan biaya assesmen.

Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.





Akar masalah

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Rekomendasi rencana aksi

Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi

Status akreditasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 tetap dipertahankan dengan melakukan surveilan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dari KAN. Rencana pelaksanaan surveilan tersebut adalah di bulan Mei 2025.



Kegiatan pengujian Laboratorium



Kegiatan Verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 10 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 10 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :



Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Lingkup Balai Besar KIPM Makassar)	1. 92 Nilai
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 71,5 Nilai
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 87 Indeks
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 86 Nilai
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6. 85 persen
7. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	7. 76 Persen
8. Nilai minimal yang di persyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	8. 75 Nilai
9. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	9. 1 Unit
10. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	10. 88 Nilai



IK8. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Maret Tahun 2023-2024					Tahun 2025					Rencana Baru Balai KIPM Makassar 2025-2026	
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2025	Target T1 2025	Kualitas T1 2025	5. Realisasi terhadap Target T1 2025	5. Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2026	5. Capaian terhadap Target Rencana
Tata laksana pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel/ secara langsung/ pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kegiatan dan Pelayanan	5. Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	88	85	82,44	79,28	87,26	81	81	100	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :



- Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
- Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 92. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025. hal-hal yang mendasari adanya pemberian nilai IKPA dengan nilai sempurna atau 100 persen adalah:



- Adanya efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA;
- Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.

Sehingga untuk menindaklanjuti kondisi di atas dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025.

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW I 2024

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW I 2024	TW I 2025	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Hal III DIPA	10	10	10	0,50
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	20	20	0,00
Belanja Konstruktif	10	10	10	0,00
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0,00
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,91	10	0,01
Disalisasi SPK	0	0	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	0	25	100,00
Nilai Total	100	74,91	100	0,335

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW I 2024 sebesar 0,335. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat



Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW IV 2024

Indikator Kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW IV 2024	TW I 2025	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Real III DIPA	10	10,02	10	0,02
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyisipan Anggaran	20	19,5	20	0,04
Selanjut Kontraktual	10	9,5	10	0,05
Pembiayaan Teguhan	10	10	10	0,00
Pengalokasian UPT dan TUP	10	9,95	10	0,01
Disposisi SPN	0	0	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	0,00
Nilai Total	100	97,18	100	0,029

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW IV 2024 sebesar 0,029. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;



- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.983.259.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 1.997.000.161 atau 28,60 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 1.997.000.161 atau 28,50 persen, sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan I 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp10.632.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.076.000 atau 47,74 persen, terdapat penurunan realisasi





anggaran pada Triwulan I 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan I 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya.

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

Akar masalah

Operator komitmen belum menyelesaikan pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI karena aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

Rekomendasi rencana aksi

- Setiap penanggungjawab kegiatan agar melaporkan target dan capaian output setiap bulan paling lambat tgl 3 bulan berikutnya dengan mengisi link yang telah disiapkan.
- Operator komitmen melakukan penginputan data target dan capaian output satker pada aplikasi SAKTI maupun modul komitmen

Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

PPK dan Tim pada TW I 2025 telah menyelesaikan kontrak :

- Pengadaan jasa internet PT Indonesia Comnet Plus sampai pada tahap penandatanganan kontrak. Dan akan direalisasikan pengerjaan sampai pada tahap pembayaran pada TW II 2025





LAPORAN KINERJA 2025

- Pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan 12 orang (sekretaris, pramubakti, petugas kebersihan, petugas keamanan, penyiap bahan uji mutu, dan petugas



pelayanan informasi)

IK9. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Rencana Tahun 2023 - 2025					Tahun 2023					Tercapai Sesuai Rencana (RTR) Tahunan 2023 - 2025	
		2023	2024	2025	2026	2027	Tercapai 2023	Tercapai 2024	Tercapai 2025	Tercapai 2026	Tercapai 2027	Tercapai 2023	Tercapai 2024
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
Pada tahun 2025, anggaran yang akan direvisi akan mencapai 100% dari anggaran yang direvisi.	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	84	87,87	88,2	88,27	71,5	71,5	100	100,00	100,00	-	-	-

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan





fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

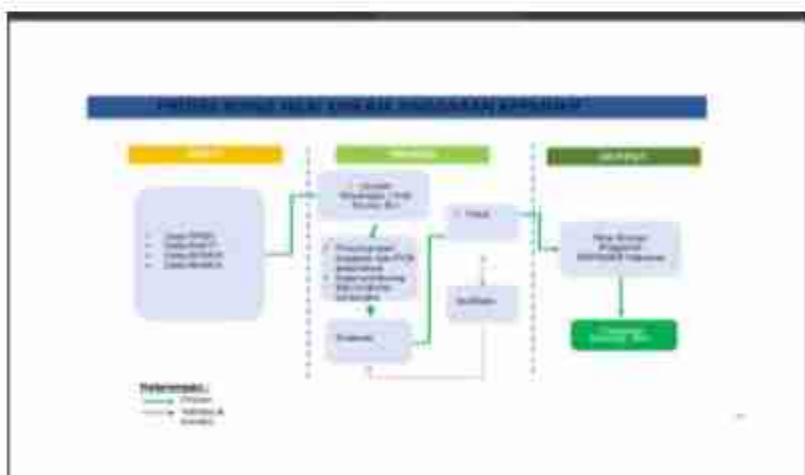
Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :



- Penyusunan revisi anggaran
- Rapat pembahasan penyusunan rencana aksi pelaksanaan anggaran tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 di BPPMHKP Makassar
- Rapat relokasi blokir anggaran tanggal 22 Januari 2025 yang dilaksanakan Sekretariat BPPMHKP

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dasboard Aplikasi Monev Kemenkeu



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 65,62 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 34,38 %

Berdasarkan tampilan dashboard diatas, total Nilai Kinerja Anggaran TW.I Tahun 2025 adalah sebesar 100 atau "Sangat Baik".

Capaian nilai perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 71,5, dimana nilai perencanaan juga berintegrasi dengan nilai IKPA. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai sebenarnya, hal ini disebabkan karena adanya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:



- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
- 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
- 3 Orang Staf KPA dan;
- 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,-. Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 40.268.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 295.884.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 1.052.000,-. Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 142.480.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun



kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asa cita.

Akar Masalah

Belum terinputnya capaian output karena pada aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

Rekomendasi rencana aksi

- Melakukan penginputan target dan capaian output bulan Januari sampai Maret 2025 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen;
- Mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;
- Menindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi

Telah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;

- Telah menindaklanjuti hasil monitoring dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.





Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :





% P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2024;

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024 pada Balai Besar KIPM Makassar oleh BPK RI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan temuan sebagai berikut :

No.	Uraian Penyetoran	Nomor dan Tanggal NTPN
1	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 6.770.700,-	No. 100F61QV3RROBMS Tanggal 23 April 2024
2	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu sebesar Rp. 5.280.000,-	No. C1C023C1FK4LPCAN Tanggal 23 April 2024
3	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 5.040.000,-	No. 9871D2G4VPI9CBJ2 Tanggal 23 April 2024

Dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah :

$$\begin{aligned}\% P &= (A/B) \times 100\% \\ &= (17.090.700/17.090.700) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024, maka capaiannya sama yaitu 100%;

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);



Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 144.310.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 135.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Rp. 9.000.000,-;

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 20.622.161,- atau 17,41% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 12.906.110,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 7.716.051,-

Akar masalah

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Rekomendasi rencana aksi

Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analisis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist

Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Telah dilakukan internalisasi Kepmen KP Nomor 56 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN dilingkungan KKP pada tanggal 22 Januari 2025



Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang dirangsang dengan Internalisasi Kepman KP Nomor 36 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN di lingkungan KIP pada tanggal 22 Januari 2025 di PTMHS Makassar.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Subsistem Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Periode Tahun 2020-2024					Tahun 2025					Rencana Balok Besar KIPM Makassar 2025-2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target 2025 Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Target 2025 Target 2025	Target 2025 Target 2025	Target 2025 Target 2025	Target 2025 Target 2025
Tata laksana pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan visi misi	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-

Menurut UU No. 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu



bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan





- c. Surat Pkt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	S1 / DIV	DIII	DI / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1 / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	S1 / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Ketersampulan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1 / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	30	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Nilai Realisasi IP ASN Tahun 2024 adalah 90,78, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.





2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 = -
 - b. Pendidikan S-2 :
 - S2 Keahlian : 7 orang
 - c. Pendidikan S-1 /D-IV :
 - S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
 - S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
 - S-1 /D-IV Pelaksana : 4 orang
 - d. Pendidikan D-III ;
 - D-III Keterampilan : 4 orang
 - D-III Pelaksana : 1 orang
 - e. SLTA :
 - SLTA Keterampilan : 1 orang
 - SLTA Pelaksana : 4 orang
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 1. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 2. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan



3. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).
4. Berdasarkan Surat Pkt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan

Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Penilaian	Jabatan Manajerial			Jabatan Non Manajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Pelatihan Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Cukup Baik	15	15	15	15	15
	- Kurang Baik	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Tahunan					
	20 JP	5	5	5	5	5
	20 JP	Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan
	20 JP	5	5	5	5	5
	20 JP	Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan
	20 JP	5	5	5	5	5



5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai		
		Maksimal	Perolehan	
Kinerja	Sangat Baik	30	30	
	Baik		25	
	Butuh Perbaikan		20	
	Kurang/Misco Induct		15	
	Sangat Kurang		10	

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK





- Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari aplikasi SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN;
 - Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN / rekonsiliasi data laporan kinerja ke SIASN BKN / data riwayat Kinerja pada SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori; dan
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
 - Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
 - Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:
- Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i & IP_1 &= W_{1j} \times R_{1j} \\
 & & IP_2 &= W_{2k} \times R_{2k} \\
 & & IP_3 &= W_{3l} \times R_{3l} \\
 & & IP_4 &= W_{4m} \times R_{4m} \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

$$IP \text{ ASN BKKIPM Makassar} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN BKKIPM Makassar}}{\text{Jumlah pegawai ASN BKKIPM Makassar}}$$





10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai aktif yang berkedudukan hukum sebagai ASN, meliputi:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar dibiayai

Capaian IP ASN Individu Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Capaian IP ASN Instansi Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>



Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dapat disajikan pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan Indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 34 Pegawai yang sebelumnya 37 pegawai yang pensiun (Hasbullah, S. St), mutasi ke Biro umum (Abdul Mubarak Azis, S.T, dan Poltek Bone (Ir Anwar, M. Si)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
10.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
11.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
12.	Pelaksana	9
	Total	34

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99.46%)





Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

Pada Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak professional dalam kaitan pelayanan publik.

Akar Masalah

- Aplikasi My ASN dan SIASN di Triwulan I bermasalah sehingga usulan diklat/pelatihan pegawai tidak terlihat pada history pengajuan ASN sehingga pada Aplikasi SIASN tidak terbaca pada menu Inbox usulan.
- Efisiensi Anggaran berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai sehingga tidak dapat dilakukan pelatihan secara langsung.

Rekomendasi rencana aksi

Aparatur sipil negara mengikuti pelatihan secara daring .

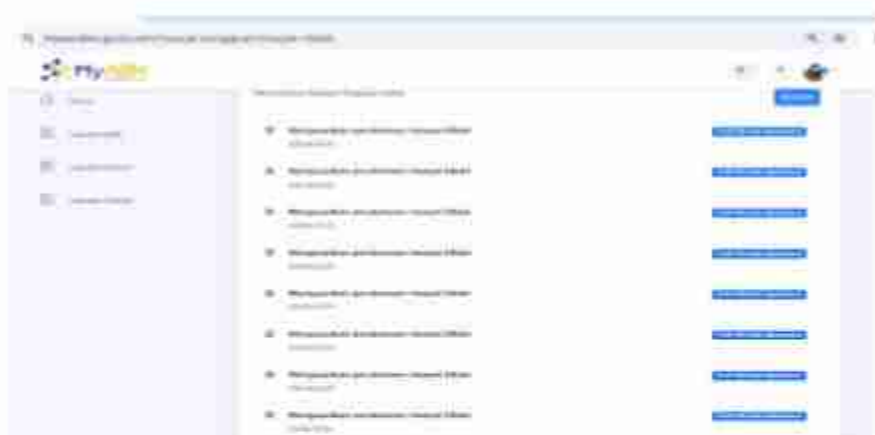




Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Telah dilakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada *myasn.bkn.go.id*

1. Telah disampaikan kepada pegawai yang nilai kompetensi belum maksimal untuk mengikuti seminar/latihan untuk pengembangan kompetensi dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id*;



History Pengajuan pelatihan Aparatur Sipil Negara MyAsn

IK 12. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Isu dan Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Tahun 2021-2024					Tahun 2025					Target 2025-2026	
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Target 2031
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan Kota Makassar	12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi.

Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen RKAKL dan Rencana Aksi yang telah terealisasi pada triwulan I mencapai 15 %



2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2024 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30 %

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Pada Triwulan I sehingga terealisasi tercapai 3,75 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal, sehingga realisasi tercapai 5% .

Bobot realisasi capaian :

Parameter 1 (15%) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (3,7 %) + parameter 4 (0%) = 48 %





$$\begin{aligned}\text{Realisasi capaian} &= \text{Bobot realisasi capaian} \times \text{Target} \\ &= 48 \% \times 86 \\ &= 41,28\end{aligned}$$

Telah dilakukan rapat sesuai dengan memorandum Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.14/BBKIPM.MKS/TU.330/III/2025 pada tanggal 5 Maret perihal penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja.

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 26.498.000 dan terealisasi sebesar Rp 900.000 atau 7,22%

Pada indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun yang diharapkan dengan penilaian mandiri sakip tersebut dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar. Dengan tercapainya indikator kinerja ini diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan akuntabel sehingga dapat mendukung Program Prioritas KKP dan Program Prioritas Nasional

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)



Akar masalah

Belum Optimalnya capaian Kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Mengoptimalkan capaian kegiatan dan anggaran pada triwulan selanjutnya

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi sebelumnya

Telah menyampaikan laporan kinerja triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahunan pada aplikasi E-SAKIP Reviu tepat waktu



Kegiatan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



IK 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Kategori Kinerja	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2023 - 2024					Tahun 2025				Rencana Tahun Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2025	Target TPI 2025	Realisasi TPI 2025	Si Kaitanya Indikator Target TPI 2025	Si Kaitanya Indikator Target TPI 2025	Target 2025 Indikator Target Rencana
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas



pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pada triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode triwulan IV tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka nilainya sama yaitu 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran semula Rp. 2.126.781.000,- setelah terkena kebijakan efisiensi menjadi Rp.1.502.912.000,- yang sampai dengan triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.402.956.249,- atau 26,81% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.822.011.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 82,83%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.





Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar masalah

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Rekomendasi rencana aksi

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen.
- Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan itjen pada aplikasi SIDAK periode triwulan I Tahun 2025.



IK 14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2022-2023					Tahun 2024					Rencana Tahun 2025	
		2022	2023	2024	2025	2026	Target 2024	Target T1 2024	Realisasi T1 2024	% Realisasi terhadap Target T1 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2025	% Capaian terhadap Target Rencana
Tata Kelola Perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Pelaksanaan dan Pelaporan	14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	-	-	79,56	72,3	84,34	78	76,00	99,00	130,34	130,34	-	-

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri



(Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP

= Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%

Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Perhitungan akan dilakukan di akhir tahun anggaran karena target kinerja ini bersifat triwulan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;
2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA- KL;
3. Mengecek kesiapan internet untuk mendukung upload ke dalam aplikasi SIRUP;
4. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP



Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dan diumumkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 41 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 4.241.547.000,- (SIRUP awal) pada bulan Januari 2025
- b. Paket Penyedia sebanyak 20 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 2.114.307.000,- (SIRUP revisi) pada bulan Maret 2025
- c. Paket Swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-
- d. Paket Penyedia dalam swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).



Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar Rp. 65.568.000,-

yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya diblokir sehingga nilainya menjadi Rp 0,-.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (Web based) adalah mendukung program nasional berupa efisiensi kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh bapak presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat program prioritas nasional melalui ASTA CITA

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
3. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.



4. SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup

Akar masalah

Potensi masalah ketidakcermatan operator SIRUP dalam melakukan penginputan data pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP

Rekomendasi rencana aksi

Meningkatkan pemahaman operator SIRUP melalui diskusi/ pelatihan/ sharing session

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya

IK 15. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Triwulan Target 2023-2024					Tahun 2025					Rencana 100% (Sasaran) 2025-2026	
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2025	Target Triwulan 2025	Realisasi Triwulan 2025	A. Realisasi terhadap Target Triwulan 2025	B. Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2026	A. Capaian terhadap Target Rencana
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam bidang Pengendalian, pengawas dan pelaksanaan Monev-kel UPT Makassar dan Polikam	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WLBK) UPT Balai Besar KIPM Makassar						75	8	8	0,08	0,08	-	-



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Balai Besar KIPM Makassar telah memperoleh predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2022 sesuai Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.420/ITJ.5/HP.550/XI/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar KIPM Makassar, diperoleh nilai total sebesar 82,24 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 43,49 (Pemenuhan 21,40 dan Reform 22,09) dan Komponen Hasil sebesar 38,75. Nilai secara total telah memenuhi ambang batas menuju WBK, namun terdapat tiga area di Komponen Pengungkit (satu area pada Pemenuhan yaitu Penataan Tata Laksana dan dua area pada Reform yaitu Penataan Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen SDM) yang tidak mencapai ambang batas 60%;

Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan: Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT



lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

Kegiatan yang Dilaksanakan :

- Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :
 - a) Pertemuan pembahasan pemenuhan dokumen penerapan WBK pada tanggal 20 Februari 2025;
 - b) Penyiapan dokumen penerapan WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
 - c) Penetapan tim kerja pembangunan WBK sesuai surat tugas Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.325/BBKIPM,MKS/OP.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
 - d) Pemenuhan kepatuhan penyampaian LHKPN sebanyak 8 orang dan SPT Tahunan sebanyak 37 orang;
 - e) Penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai (ASN, PPNP dan PJLP);
 - f) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - g) Penerbitan surat dan memorandum himbauan tidak menerima gratifikasi pada momen hari raya keagamaan dan penyampaiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - h) Penandatanganan berita acara tuntas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 25 Maret 2025;
 - i) Melakukan bincang inspiratif bertema pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh seluruh pegawai pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., MP;



- j) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan neon box, perbaikan running text, dan pengaktifan announcement menjaga integritas);
- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
 - (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - (3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
 - (4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15,00;
 - (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 58 orang, yang terdiri dari ASN 34 orang dan non ASN 24 orang;

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi, anggarannya menjadi Rp. 0,-.

- Penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendukung tercapainya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yang meliputi (1)



pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, (2) ekonomi biru berkelanjutan, (3) swasembada pangan, (4) peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan, dan (5) pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan; disamping itu juga dapat mendukung terwujudnya program nasional Asta Cita yang menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045;

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK/WBBM pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
 - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
 - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
 - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
 - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
 - (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran;

Akar masalah

Keterlambatan verifikasi dokumen implementasi zona integritas WBK menuju WBBM dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;



Rekomendasi rencana aksi

- Masing-masing penanggung jawab unsur menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan;
- Tim sekretariat melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK sebelum divalidasi oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar;

Hasil Tindaklanjuti rekomendasi rencana aksi

Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya;



Rapat Pembahasan penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)



IK 16. Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Bidang Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Tahun 2021-2024					Tahun 2025					Rata-rata Nilai IK Tahun 2021-2025	
												Target 2025	Nilai Capaian Target 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025		
Tata laksana pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas dalam meningkatkan dan pengembangan mutu hasil pelayanan publik	Efisiensi Pelayanan Publik (EPP) UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	1	1	0,00	0,00	-	-

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :

- Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;





- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

a. Penggunaan teknologi

- 1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah





2. Menggunakan teknologi mobile
3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE.

Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.

- Verifikasi biometric
 - Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
 - Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital
 - Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem membandingkan data biometrik baru dengan template yang sudah disimpan
 - Verifikasi biometrik lebih aman dibandingkan dengan metode tradisional seperti PIN atau kata sandi
- Single Sign On (SSO)
 - Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
 - SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
 - SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
 - Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna





- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan public

b. Pelatihan

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

c. Kolaborasi

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Morning briefing petugas layanan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan





- b. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bpk Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P menjadi nara sumber pada kegiatan Forum Peningkatan Kapasitas UMKM pengolahan hasil perikanan tanggal 3 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Hal ini mendukung implementasi/ inovasi layanan legal ekspor UMKM
- c. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai (ASN, PPNP dan PJLP) tanggal 3 Februari 2025
- d. Rapat penyusunan proposal inovasi pelayanan publik tanggal 3 Februari 2025 dengan tema/kategori pemerataan ekonomi/ penguatan UMKM yang berfokus pada layanan legalitas ekspor UMKM lingkup Sulawesi Selatan.
- e. Bincang Inspiratif pengendalian gratifikasi di lingkup Badan Mutu KKP Makassar pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar

Pelaksanaan kegiatan dengan metode pelatihan/ bincang inspiratif/ sharing session diharapkan mampu meningkat kualitas layanan serta mampu :

- Membentuk pegawai berintegritas:
Pegawai menolak gratifikasi dan memahami bahaya penerimaan gratifikasi
- Membentuk citra positif instansi:
Instansi bebas dari korupsi dan memiliki kredibilitas
- Mendukung lingkungan bebas korupsi:
Instansi memiliki budaya anti gratifikasi dan lingkungan pengendalian yang kondusif
- Meningkatkan kepercayaan publik :
Masyarakat memperoleh layanan tanpa gratifikasi, suap, dan pemerasan





Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KPIM Makassar sebanyak 60 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNN/PJLP sebanyak 24 pegawai.

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu awal sebesar Rp.33.777.000, menjadi sebesar Rp.3.600.000

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 633.500,- atau sebesar 17,60%.

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :

- **Meningkatkan kualitas layanan**

Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.

- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**





Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.

- **Efisiensi Biaya dan Waktu**

Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.

- **Mempersiapkan menghadapi perubahan**

Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.

- **Menjawab kebutuhan masyarakat**

Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akar masalah

Petugas pelayanan kurang update pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap regulasi dan standar pelayanan publik terkini.

Rekomendasi rencana aksi

Agar seluruh pegawai dapat meningkatkan skill atau keterampilan dalam peningkatan pelayanan public dengan mengikuti pelatihan/ diklat / sharing session/ bincang inspiratif dibidang pelayanan publik dan peningkatan integritas pegawai

Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik baru dilaksanakan di tahun 2025 sehingga belum ada rekomendasi rencana aksi sebelumnya di triwulan IV 2024





IK 17. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori/Indikator	Indikator Kinerja (IK)	Periode Tahun 2023-2024					Tahun 2025					Rencana Kerja Besar (RK) Tahun 2025-2026	
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2025	Target 2026	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target 2025	Target Tahun 2026
Tata laksana pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	17. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Bagi Riset KIPM Makassar	-	-	88,8	81,02	87,7	88	9	0	0,00	0,00	-	-

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SUrvey kepuasAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 9 (Sembilan) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:





1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/ HACCP)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
3. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
5. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
6. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
7. Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
8. Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
9. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{e^2}$$

X = Nilai di atas tabel 3.841
 dimana $Z = 1$ dan $\alpha = 5\% = 0.05$
 P = Persentase proporsi populasi (jika tidak diketahui maka $P = 0.5$)
 N = Jumlah Populasi
 e = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$n = \frac{3.841^2 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times 47} = \frac{3.841^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times 47}$$

$$n = \frac{46.282}{0.00235} = 19.694 \approx 47$$

Source: ibm 2002

Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
1	1	101	10	201	20
2	2	102	11	202	21
3	3	103	12	203	22
4	4	104	13	204	23
5	5	105	14	205	24
6	6	106	15	206	25
7	7	107	16	207	26
8	8	108	17	208	27
9	9	109	18	209	28
10	10	110	19	210	29
11	11	111	20	211	30
12	12	112	21	212	31
13	13	113	22	213	32
14	14	114	23	214	33
15	15	115	24	215	34
16	16	116	25	216	35
17	17	117	26	217	36
18	18	118	27	218	37
19	19	119	28	219	38
20	20	120	29	220	39
21	21	121	30	221	40
22	22	122	31	222	41
23	23	123	32	223	42
24	24	124	33	224	43
25	25	125	34	225	44
26	26	126	35	226	45
27	27	127	36	227	46
28	28	128	37	228	47
29	29	129	38	229	48
30	30	130	39	230	49
31	31	131	40	231	50
32	32	132	41	232	51
33	33	133	42	233	52
34	34	134	43	234	53
35	35	135	44	235	54
36	36	136	45	236	55
37	37	137	46	237	56
38	38	138	47	238	57
39	39	139	48	239	58
40	40	140	49	240	59
41	41	141	50	241	60
42	42	142	51	242	61
43	43	143	52	243	62
44	44	144	53	244	63
45	45	145	54	245	64
46	46	146	55	246	65
47	47	147	56	247	66
48	48	148	57	248	67
49	49	149	58	249	68
50	50	150	59	250	69
51	51	151	60	251	70
52	52	152	61	252	71
53	53	153	62	253	72
54	54	154	63	254	73
55	55	155	64	255	74
56	56	156	65	256	75
57	57	157	66	257	76
58	58	158	67	258	77
59	59	159	68	259	78
60	60	160	69	260	79
61	61	161	70	261	80
62	62	162	71	262	81
63	63	163	72	263	82
64	64	164	73	264	83
65	65	165	74	265	84
66	66	166	75	266	85
67	67	167	76	267	86
68	68	168	77	268	87
69	69	169	78	269	88
70	70	170	79	270	89
71	71	171	80	271	90
72	72	172	81	272	91
73	73	173	82	273	92
74	74	174	83	274	93
75	75	175	84	275	94
76	76	176	85	276	95
77	77	177	86	277	96
78	78	178	87	278	97
79	79	179	88	279	98
80	80	180	89	280	99
81	81	181	90	281	100
82	82	182	91	282	101
83	83	183	92	283	102
84	84	184	93	284	103
85	85	185	94	285	104
86	86	186	95	286	105
87	87	187	96	287	106
88	88	188	97	288	107
89	89	189	98	289	108
90	90	190	99	290	109
91	91	191	100	291	110
92	92	192	101	292	111
93	93	193	102	293	112
94	94	194	103	294	113
95	95	195	104	295	114
96	96	196	105	296	115
97	97	197	106	297	116
98	98	198	107	298	117
99	99	199	108	299	118
100	100	200	109	300	119

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2.798 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden



yang diambil adalah sebanyak 338 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 197, hal ini tidak memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Kurangnya jumlah responden di Balai Besar KIPM Makassar salah satunya disebabkan adanya kegiatan pelayanan secara virtual terkait kebijakan efisiensi anggaran sehingga penyampaian pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tidak berjalan secara optimal. Serta pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Ada beberapa jenis layanan yang belum diberikan ke pengguna jasa karena penambahan jenis pilihan layanan pada aplikasi tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$





Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 197 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,72 atau sebesar 93,32 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 106,04%. Apabila data Hasil IKM

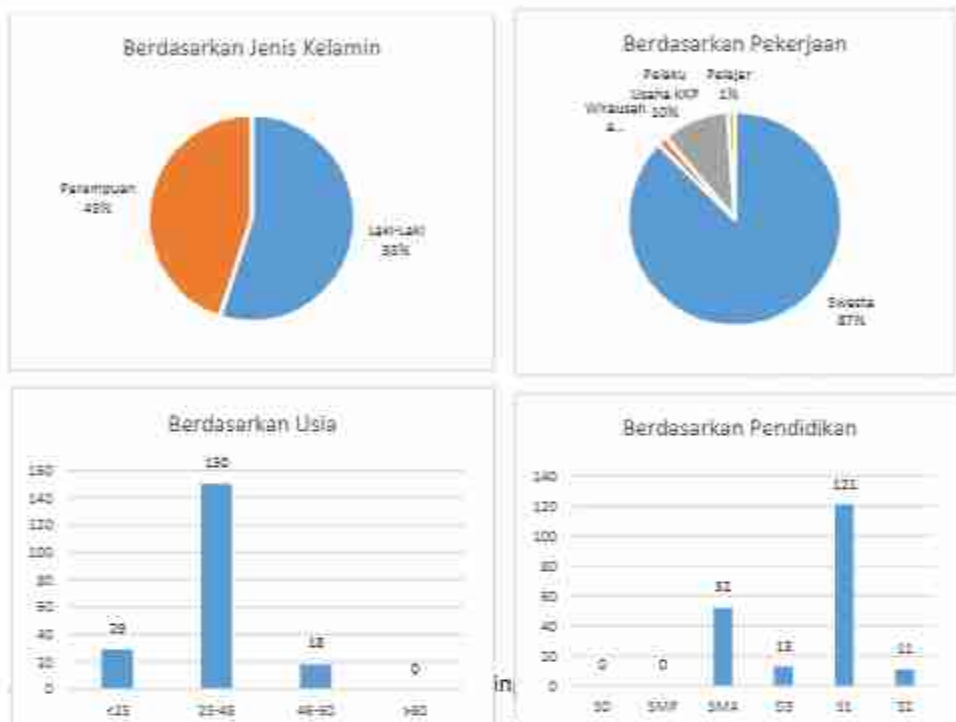
Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan TW I Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan IV - 2024	Triwulan I - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3,750	3,723	↓
2	Kemudahan prosedur	3,737	3,731	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,735	3,724	↓
4	Kesesuaian biaya	3,727	3,711	↓
5	Kesesuaian produk	3,725	3,741	↓
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,738	3,708	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,775	3,718	↓
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,812	3,746	↓
9	Kualitas isi/sarana	3,785	3,708	↓
	Nilai IKM	94,20	93,32	





Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2025 yaitu:



serta unsur kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk unsur kualitas isi/ sarana serta unsur kecepatan respon walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline selanjutnya mengalami perubahan aplikasi menjadi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT



BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini kadang mengalami kendala. Serta aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami peningkatan dari 91,60 menjadi 93,32. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan IV pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami penurunan dari 94,20 menjadi 93,32. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan IV Tahun 2024 ke Triwulan I 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Selama masa transisi aplikasi ini petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan I Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" kepada Balai Besar KIPM Makassar pada Tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 6 Maret 2025. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat adalah dengan mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP pada tanggal 10 s.d. 13 Maret 2025 secara daring.





Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
6.	PPNPN	12
7.	PJLP	12
	TOTAL	42

Pada tahun 2024 terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 379.200.000,-. Hingga Triwulan I tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 92.578.921,- pada langganan daya dan jasa, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 286.621.079,-.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk



menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar masalah

Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu kurang konsisten menyampaikan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa setelah memberikan layanan.

Pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu belum memutakhirkan pengetahuan mengenai isi survey dan standar pelayanan terbaru Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi

Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk meningkatkan jumlah responden kepada pengguna layanan.

Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi





Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIAPMutu dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 kepada petugas layanan dan pengguna jasa.



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar 112,41 (kategori istimewa). Dari 17 (Tujuh Belas) IKU ada 4 (Empat) IKU baru yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	-
2.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	1
3.	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	75	-
4.	Inovasi pelayanan public lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	-

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di propinsi sulawesi selatan dan para penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka pendampingan ke UPR yang akan mengajukan sertifikasi melalui OSS; (IKU 1)
2. Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik. (IKU2)
3. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu semester II. (IKU 4)
4. Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang kegiatan evaluasi kesesuaian penerbitan HC dan detail pelaksanaannya. (IKU5)
5. Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium (IKU6)

4.3 Tindaklanjut

Adapun rekomendasi pada triwulan IV tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi : Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis (IKU 1)

Tindaklanjut :

Telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPiB Kapal

2. Rekomendasi : Perlu akselerasi pelaksanaan sertifikasi SKP sesuai target yang ditetapkan (IKU2)

Tindaklanjut :

- Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik.
- Melakukan komunikasi secara intensif dengan calon pemasok dan Direktorat teknis (PDSPKP) sebagai pelaksana penilaian CDiB dalam rangka percepatan sertifikasi SPDi;

3. Rekomendasi : Mendorong kepada para pelaku usaha di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi (IKU3)

Tindaklanjut :

1. Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025.
2. Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi

4. Rekomendasi Melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP No. 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan SMHKP kepada Inspektur Mutu dan petugas pelayanan. (IKU4)

Tindaklanjut :

- 1) Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut :
 - a. Sharing Session Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang salah satu agendanya membahas Sosialisasi Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025.
 - b. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari 2025.
 - c. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU bersama pelaku usaha/eksportir produk perikanan tujuan China pada tanggal 25 Maret 2025.
- 2) Telah dilakukan kordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada tanggal 22 Januari 2025 pasca kegiatan Rapat Relokasi Blokir oleh Sekretariat BPPMHKP.



Lampiran Perjanjian Kinerja 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Rahayu Setyaningsih**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Rahayu Setyaningsih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	92
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71,5
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	85
		14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	76
		15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Unit)	1
		17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11.326.526.000
2.	Manajemen Mutu	178.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	375.000.000
Total Anggaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2025		11.879.526.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Rahayu Setyaningsih

Lampiran Form Capaian Kinerja
Triwulan I 2025

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70	0	0	0	0	0	0	0	70
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0	0	0
%Capaian	142,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPiB) Di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPiB)
 - Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBiB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPiB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOiB)
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOiB)

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
- Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDDIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian (ku) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
- C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CDDIB
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

Adapun target sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 sertifikat. untuk memudahkan pencapaian target tersebut dibagi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Capaian Per Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Sertifikasi CPIB Kapal	0	3	2	0
2	Sertifikasi CBIB	1	1	1	0
3	Sertifikasi CPIB	0	1	1	1
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0	2

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi sertifikasi CBIB sebanyak 1 sertifikat dari target 3 sertifikat. Sedangkan realisasi sertifikasi CPIB Kapal, CPIB Pembenihan dan CPPIB Pakan pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 0 sertifikat dari total target sebanyak 10 sertifikat. Dengan demikian persentase dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$A = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A}{XN} \times 100\% \\ &= \frac{100}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPiB Kapal
- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu : Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBiB). Kegiatan CBiB dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di CV. Senada Horta Jl. RAJAWALI NO. 37, Desa/Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Inspeksi CBiB ini dilaksanakan oleh Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sesuai dengan kode KBLI 03254 yaitu komoditi Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*).
- Pada tanggal 19 Februari 2025 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi terhadap seluruh UPT BPPMHKP terkait SOP Pelaksanaan Sertifikasi pada Sektor Produksi Primer yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Maret 2025 telah dilaksanakan sharing session dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di BPPMHKP Makassar, sharing session ini menjadi wadah bagi setiap penanggung jawab kegiatan teknis untuk memaparkan pedoman teknis yang relevan, sejalan dengan amanat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian.
- Pada tanggal 17 – 18 Maret 2025 telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPiB) Kapal oleh Pusat Mutu Produksi Primer, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPPMHKP Makassar diperoleh nilai total atas konsistensi pemenuhan Penerapan Persyaratan Teknis dengan jumlah 97,44 % dengan peringkat sangat baik, kegiatan dilanjutkan dengan bincang inspiratif tentang Strategi Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPiB Kapal diharapkan seluruh peserta dapat berbagai pengalaman, tantangan serta solusi yang implementasi kebijakan terkait sehingga tercipta harmonisasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang lebih baik.
- Pada tanggal 18 Maret 2025 telah dilakukan kegiatan pementapan persiapan pelaksanaan inspeksi dan surveilan tahun 2025 khususnya dalam rangka penerbitan sertifikat cara pembustanan pakan ikan yang baik (CPPiB) dan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOiB) terhadap seluruh UPT BPPMHKP yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.

SDM

- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CBiB pada TW I sebanyak 2 orang yang terdiri dari 2 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

ANGGARAN

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.

PROGRAM NASIONAL

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

ASPEK PEMANFAATANNYA

- Pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	18.820.000	-	18.820.000
JUMLAH		18.820.000	-	18.820.000

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Unit Pembenihan Rakyat dan Unit Pembesaran Rakyat belum familiar dengan aplikasi OSS sehingga berdampak dalam melakukan permohonan pengajuan sertifikasi.
- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPiB Kapal perikanan.
- Sehubungan dengan tindak lanjut Plan of Action dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa BPPMHKP Makassar mendapatkan target 133 kapal yang harus disertifikasi paling lambat minggu kedua bulan juni tahun 2025 namun sebanyak 88 kapal belum memiliki bintek CPiB, 3 kapal yang mensuplai ke PT. Prima Indo Tuna sudah memiliki bintek namun berdasarkan informasi kapal tersebut akan melakukan pembongkaran ikan kembali di PPI Lappa sinjai pada bulan 12 tahun 2025 – bulan Maret tahun 2026, sebanyak 42 kapal PT. Ocean Champ Seafood yang merupakan kumulatif dibawah 5 GT berdasarkan informasi dari pusat primer belum bisa dilakukan inspeksi dikarenakan Permen KP terkait CPiB Kapal belum terbit.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di propinsi sulawesi selatan dan para penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka pendampingan ke UPR yang akan mengajukan sertifikasi melalui OSS; - Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis; - Melakukan penundaan sertifikasi terhadap 42 kapal yang mensuplai ke OCS dimana kapal tersebut berukuran ≤ 5 GT sampai menunggu Permen KP terkait CPiB Kapal diterbitkan.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIS Kapal	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, April 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Katimja

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB di Triwulan I Tahun 2025

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	CV SENADA HORTA	Udang vannamei (Litopenaeus : vannamei)	B	ID-CBIB-P-73-250012 Tanggal 07 Februari 2025

**DOKUMENTASI KEGIATAN
KOORDINASI DENGAN DIREKTUR PELABUHAN DAN PENANGGUNG JAWAB PP UNTIA**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK DI CV SENADA HORTA**



DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI TERHADAP SELURUH UPT BPPMHKP TERKAIT SOP PELAKSANAAN SERTIFIKASI PADA SEKTOR
PRODUKSI PRIMER



DOKUMENTASI KEGIATAN
SHARING SESSION DALAM RANGKA MEMINDAKANJUTI SURAT B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



**DOKUMENTASI KEGIATAN
MONITORING PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) KAPAL**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
BINCANG INSPIRATIF TENTANG STRATEGI KEBERHASILAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI CPIB KAPAL**





**Lampiran 2. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengendalian kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70								70
Realisasi	115,08								
% Capaian	164,4								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu; Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan I 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.

CARA PENGUKURAN

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSOP
- xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW I 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	49	83	169,38%
2	Sertifikasi SKP (B)	102	62	60,78%

Catatan :

1. Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 169,38% karena terdapat permohonan baru dan penambahan ruang lingkup produk.
2. Realisasi sertifikasi SKP hanya mencapai 60,78% karena terdapat 40 rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\%X = \frac{169,38 + 60,78}{2}$$

$$= 115,08 \%$$

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 115,08 %, dari target 70 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 164,40 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBL terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP akan segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP, serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPiB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikananannya dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPiB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 151.804.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 58.196.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp. 22.365.000,- atau sebesar (38,43%).

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran, sebagian kegiatan sertifikasi SKP harus dilakukan dengan mekanisme virtual. Hal ini berpotensi terhadap kurang optimalnya hasil inspeksi mengingat lokasi unit pengolahan masih baru dan belum ada gambaran kondisi yang sebenarnya secara langsung.
- Pelaksanaan Sertifikasi SPDI akan dilaksanakan jika pihak pemasok/supplier harus terlebih dahulu menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDiB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis yaitu Direktorat Penguatan Daya Saing (PDSPK) sehingga untuk melaksanakan kegiatan SPDI harus menunggu penilaian CDiB terlebih dahulu;

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

- Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik.
- Melakukan komunikasi secara intensif dengan calon pemasok dan Direktorat teknis (PDSPK) sebagai pelaksana penilaian CDiB dalam rangka percepatan sertifikasi SPDI;

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja
Pengendalian Kesehatan
Ikan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Berkolaborasi dengan petugas verifikasi SKP pada dinas perikanan tingkat satu agar persyaratan sebelum penerbitan rekomendasi dinas sudah terpenuhi terlebih dahulu mulai dari awal tahun 2025. - Telah dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen; - Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen; - Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara daring pada tanggal 13 maret 2025.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, April 2025
 Penanggungjawab indikator Kinerja

Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pt,M.Sc

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI





DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN
DI UPI





Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025



Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025



Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara daring pada tanggal 13 maret 2025.



**Lampiran 3. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan 1

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	0	1	1			1			1
Realisasi									
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung. Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

1. Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPi merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
2. Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (Pb, Cd, Hg) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli*, *Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguotoks* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I tahun 2025 kegiatan monitoring cemaran perairan belum dilaksanakan oleh BPPMHKP makassar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer pada tanggal 19 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP. Pada kegiatan tersebut Pusat Mutu Produksi Primer menyampaikan target lokasi monitoring cemaran perairan untuk BPPMHKP Makassar sebanyak 1 (satu) lokasi, yaitu Perairan Makassar.

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 8 orang yang terdiri atas 6 orang Inspektur Mutu dan 2 orang Asisten Inspektur Mutu.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah satu IKU yang mendukung program prioritas KKP. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang dikonsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun hayati laut dan logam berat.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- di blokir sebesar Rp. 5.340.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 4.660.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.380.000,- atau sebesar (8,15%) yang digunakan untuk pembelian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik sisa anggaran sebesar Rp. 4.280.000,-

Sebagai perbandingan, anggaran pada Anggaran kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 92.000.000,- yang terealisasi pada Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 1.090.000 atau sebesar (1,18 %) yang terdiri dari pembelian sampel uji.

Dari jumlah pagu anggaran Tahun 2025 terjadi penurunan anggaran, sedangkan dari realisasi anggaran jika dibandingkan antara triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran disebabkan nilai anggaran tahun 2024 lebih besar dari anggaran tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah petugas/pelaksana kurang memahami ketentuan yang berlaku terkait monitoring cemaran perairan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan Sosialisasi / Refresment/ Sharing session peningkatan kompetensi Inspektur mutu melalui bincang inspiratif.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 10 April 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Moh. Zamrud, S.Pi, M.Si

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER
PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2025



**Lampiran 4. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (4)	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama ILK	:	Pengawasan Kesenatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Saran Kegiatan	:	Persepsi, kajian Pengawasan dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	1	0	1	1	0	1	1	100	1
Realisasi	1								
%Capaian	100								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat, penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pascapanen pada tanggal 18 Februari 2025 yang dihadiri oleh UPT BPPMHKP secara virtual. Pusat Mutu Pascapanen melakukan pembahasan kegiatan tahun 2025, yang bertujuan untuk berkoordinasi, berdiskusi, persamaan persepsi antara Pusat dan UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada triwulan I tahun 2025 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kota Makassar dengan lokus pengawasan yaitu Pasar Tradisional Daya.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional Daya.
2. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di Pasar Tradisional Daya, terdapat 5 sampel yaitu cumi-cumi segar, ikan bandeng segar, ikan katamba segar, ikan kerapu segar dan udang vannamei segar. Telah dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, dan Formalin. Dari hasil pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene pada pasar tradisional Daya. Setelah dilakukan pengamatan pasar tradisional Daya memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana lokasi berada ditempat bebas pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat, saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu, transportasi pengangkutan produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga.

Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 sebesar Rp. 31.500.000,-. Anggaran indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 77.240.000,- yang terealisasi pada TW I tahun 2024 sebesar Rp. 10.671.929,- atau 13,82%.

Pada triwulan I tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memastikan ketersediaan ikan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat, melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan I tahun 2024 adalah 10 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), BPPSDMKP Maros dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah: Berupa pemahaman pelaku usaha terkait cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene masih kurang yang memungkinkan penurunan mutu ikan yang di pasarkan.

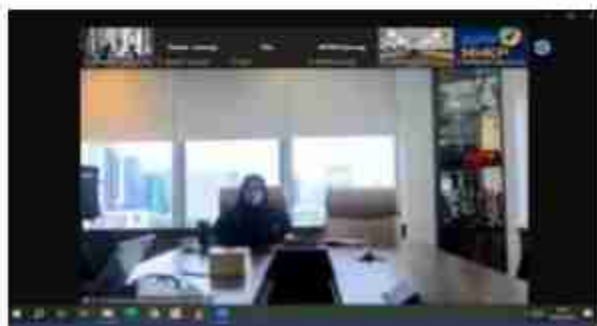
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu semester II.	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1. Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025. 2. Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 10 April 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Mohammad Zamrud

Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran tanggal 18 Februari 2025



**Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2025
di Pasar Tradisional Daya Kota Makassar**



**Rangkaian Kegiatan Pengujian di Laboratorium
Balai Besar KIPM Makassar**



**Lampiran 5, FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99								99
Realisasi	100								
% Capaian	101								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyajian sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua

KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

A : $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (K1-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

Pada triwulan I tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 45,04 ton senilai Rp. 1,53 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 2.798 sertifikat. Adapun pada triwulan I tahun 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47.932 ton senilai Rp. 1,68 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.444 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah sertifikat ekspor sebesar 12,65 % di triwulan I tahun 2025. Hal ini berbanding terbalik dengan volume ekspor yang mengalami penurunan di triwulan I tahun 2025 jika dibandingkan triwulan I tahun 2024 sebesar 6,03%.

Data pada triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2024 terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan berupa *Frozen Flying Fish Roe* sebanyak 1 container dengan volume 12.000 Kg/1200 carton tujuan negara Taiwan. Penolakan disebabkan karena ketidaksesuaian jenis produk dengan permintaan buyer. Penolakan ini tidak masuk dalam kategori kasus penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Berdasarkan formula penghitungan IKU, Komponen A tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan disebabkan sejak awal tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur organisasi, dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, sehingga

B : $\frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

$$\frac{2.798 - 0}{2.798} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan I tahun 2025 adalah 100%. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara Triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2025 yaitu 100 %;

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu sebanyak 18 orang serta didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 12 orang dan PJLP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan peralihan aplikasi pelayanan sertifikasi dari Sisterkaroline (Sistem Komputerisasi Karantina Ikan dan Mutu Online) ke aplikasi SIAP MUTU (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu). Aplikasi SIAP MUTU telah diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2025 dan diharapkan dapat mengakomodir pelayanan sertifikasi mutu dan penjaminan mutu hulu hilir. Selain itu, telah dilakukan kegiatan piloting dan sosialisasi aplikasi SIAP MUTU kepada pelaku usaha.

Kegiatan peningkatan kompetensi untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	5 Januari 2025
2.	Sosialisasi Penerbitan SMKHP Melalui Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	22 Januari 2025
3.	Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	27 Februari 2025
3.	Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	28 Februari 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Evaluasi kesesuaian penerbitan HC.
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW I 2025	Persentase Realisasi
1	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2	3989.QJC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3	3989.8IA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
- Masih relatif tingginya permintaan revisi SMKHP oleh pengguna jasa. - Terdapat kegiatan pendukung IKU berupa evaluasi kesesuaian penerbitan HC yang masih baru dan belum dilakukan sosialisasi pelaksanaannya.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Melakukan penyadartahuan/edukasi/sosialisasi tentang ketentuan revisi SMKHP melalui penilaian kepatuhan pelaku usaha. - Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang kegiatan evaluasi kesesuaian penerbitan HC dan detail pelaksanaannya.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1) Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut : a. Sharing Session Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang salah satu agendanya membahas Sosialisasi Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025. b. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari 2025. c. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU bersama pelaku usaha/eksportir produk perikanan tujuan China pada tanggal 25 Maret 2025. 2) Telah dilakukan kordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada tanggal 22 Januari 2025 pasca kegiatan Rapat Relokasi Blokir oleh Sekretariat BPPMHKP.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Makassar, April 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

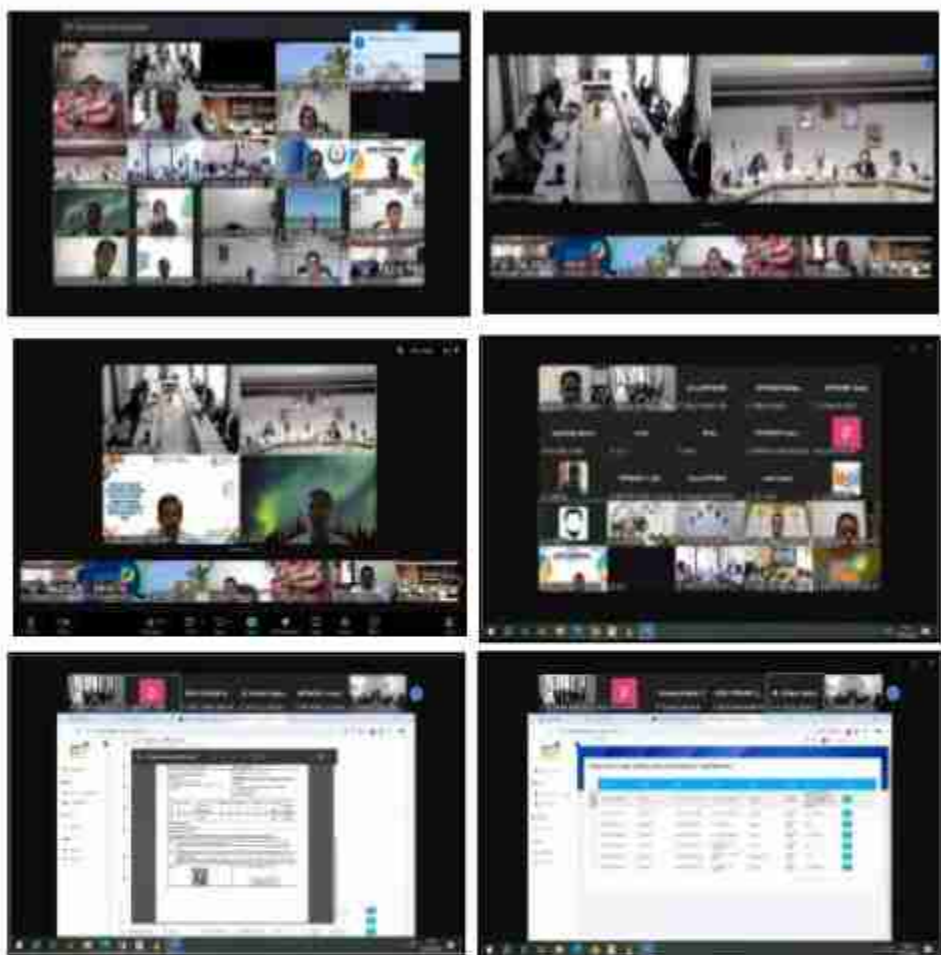
Mohammad Zamru

DOKUMENTASI KEGIATAN

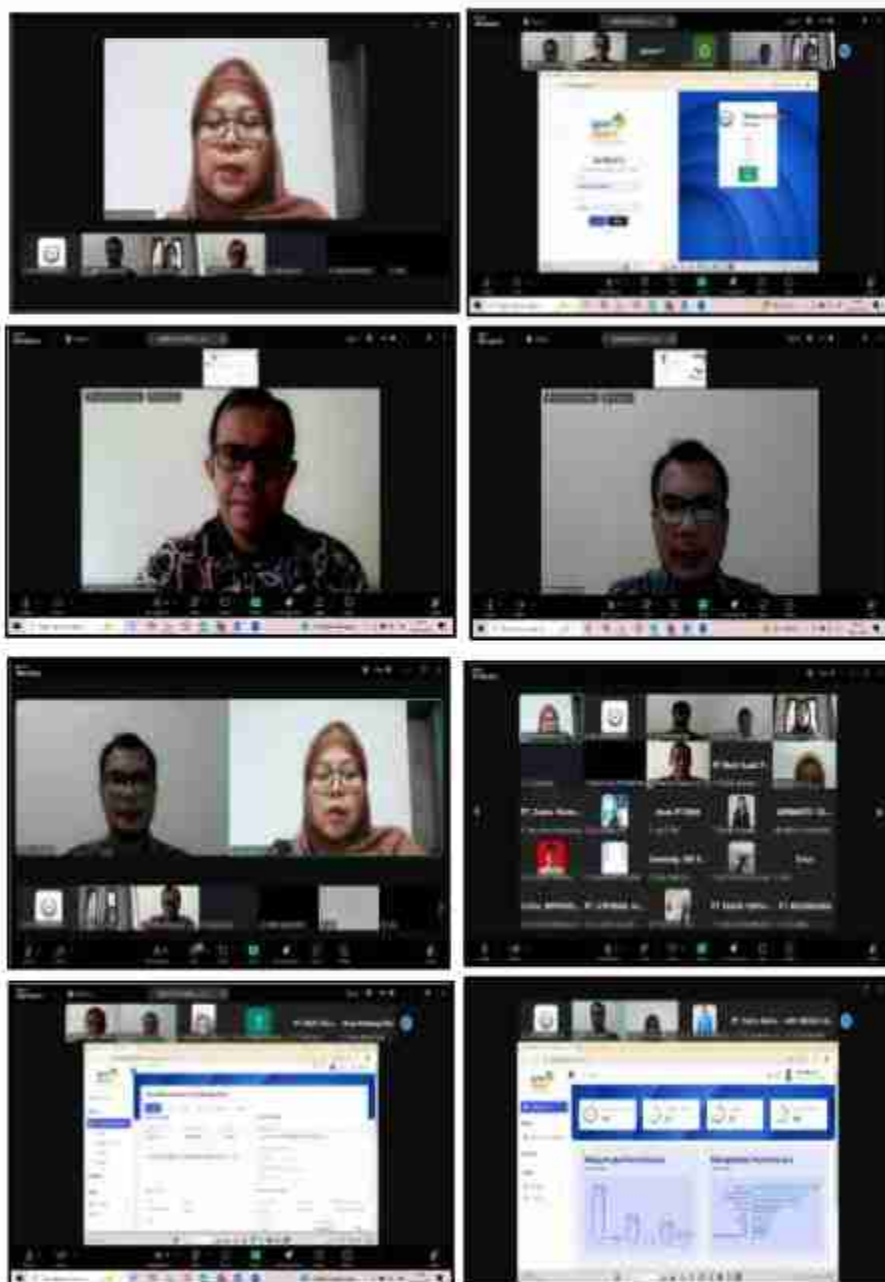
1. *Sharing Session* Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Tanggal 5 Maret 2025



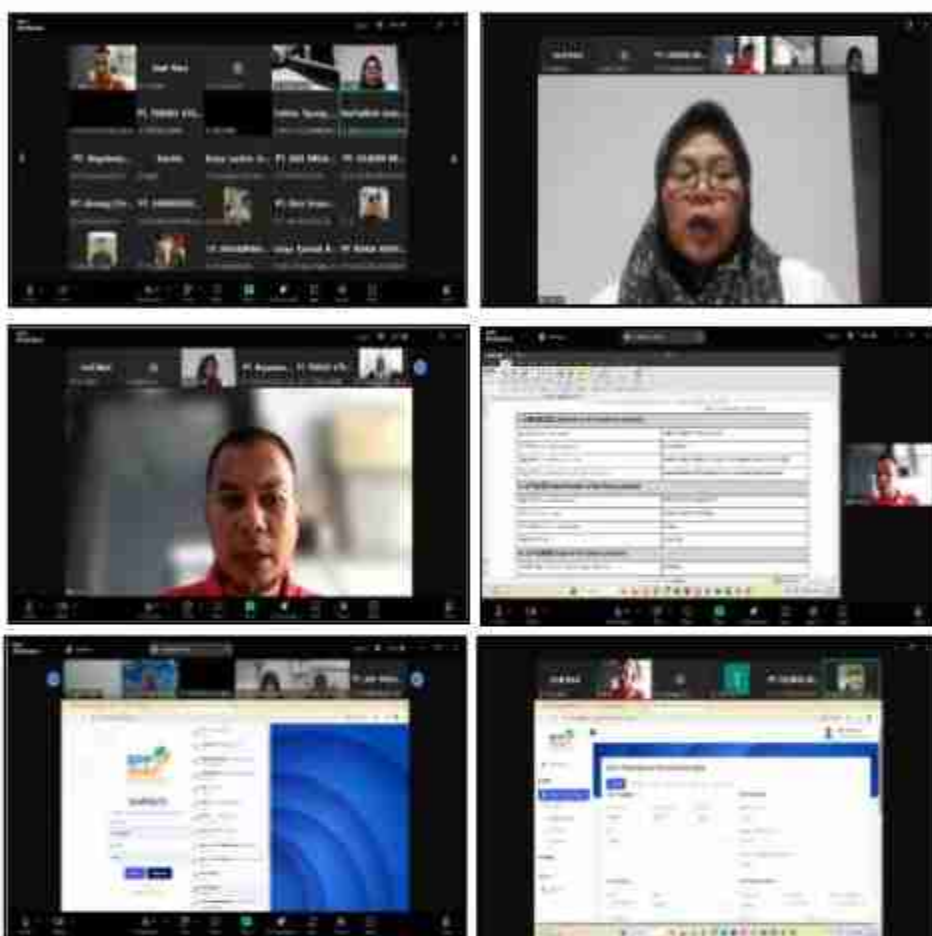
2. Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU Pada Tanggal 27 Februari 2025



3. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada Tanggal 28 Februari 2025



4. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU Bersama Pelaku Usaha/Eksportir Tujuan China Pada Tanggal 25 Maret 2025



**Lampiran 6. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Timja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	-								
%Capaian	-								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020). - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai meliputi: - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumberdaya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen. - Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 94 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP. - Pada Triwulan I Tahun 2025 telah pula dilakukan Sharing Session pedoman teknis pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Keputusan Kepala BPPMHP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025 di Aula Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar untuk meningkatkan pemahaman inspektur mutu dalam pelaksanaan kegiatan surveilan HACCP. - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus : $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ dimana : $\bar{x}$ = Rata-rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan	

- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPB Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar Rp. 3.500.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- atau menurun sebesar 82,5% dari anggaran tahun sebelumnya.
- Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu belum direalisasikan sama sekali. Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II berupa iuran tahunan sebanyak Rp. 1.500.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- berupa anggaran pertanggungjawaban jika terdapat kesalahan dalam kegiatan surveilan yang mengakibatkan kerugian pada audit.
- Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi oleh Pusat Manajemen Mutu. Untuk itu pada Triwulan I Tahun 2025 ini Balai Besar KIPM Makassar belum memperoleh nilai penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Status akreditasi sistem manajemen mutu lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 tetap dipertahankan dengan melakukan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 pada kegiatan operasional Balai Besar KIPM Makassar.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 9 April 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Muhammad Irfan Rais

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN PENERAPAN SNI ISO/IEC 17020:2012
TRIWULAN I TAHUN 2025



FOTO SOSIALISASI JUKNIS SURVEILAN TGL 5 MARET 2025



**Lampiran 7. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	91,23								
%Capaian	121,64								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai meliputi:
 1. Ruang Lingkup;
 2. Acuan Normatif;
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural;
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Proses;
 7. Persyaratan Sistem Manajemen
- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

 - $\bar{X}$ = Rata-rata
 - $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n
 - n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 3.751 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 1.056 kali 2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.790 kali 3. Pengujian Kimia sebanyak 683 kali 4. Pengujian Air dan Es sebanyak 222 kali • Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium. • Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. • Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar Rp. 36.537.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- atau menurun sebesar 47,8% dari anggaran tahun sebelumnya. • Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 1.500.000,- atau sebesar 4,1 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 35.037.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II, III, dan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, uji banding, dan biaya assesmen. • Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.
--

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Status akreditasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 tetap dipertahankan dengan melakukan surveilan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dari KAN. Rencana pelaksanaan surveilan tersebut adalah di bulan Mei 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 9 April 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Muhammad Irfan Rais

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN LABORATORIUM TRIWULAN I TAHUN 2025



LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM
TRIWULAN I TAHUN 2025



**Lampiran B: FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	92								92
Realisasi	100								
%Capaian	109								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

 Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

 Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%

- d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 92. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyesuaian data dan perhitungan indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025. hal-hal yang mendasari adanya pemberian nilai IKPA dengan nilai sempurna atau 100 persen adalah:

- Adanya efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA;
- Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.

Sehingga untuk menindaklanjuti kondisi di atas dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025.

- Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW I 2024

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW I 2024	TW I 2025	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Hal III DIPA	15	10	13	0,30
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	20	20	0,00
Belanja Kontraktual	10	10	10	0,00
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0,00
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,91	10	0,01
Dispensasi SPM	0	0	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	0	25	100,00
Nilai Total	100	74,81	100	0,335

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW I 2024 sebesar 0,335. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

- Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW IV 2024

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW IV 2024	TW I 2025	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Hal III DIPA	15	13,33	13	0,09
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,2	20	0,04
Belanja Kontraktual	10	9,2	10	0,08
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0,00
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,95	10	0,01
Dispensasi SPM	0	0	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	0,00
Nilai Total	100	97,88	100	0,029

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW IV 2024 sebesar 0,029. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

SUMBER DATA MAJUSA

Untuk mendukung tercapainya Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: 8.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: 8.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatangan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 8.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.983.259.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 1.997.000.161 atau 28,60 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 1.997.000.161 atau 28,50 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan I 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp10.632.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.076.000 atau 47,74 persen. Terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan I 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan I 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya.

PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

LAMPIRAN KEGIATAN TRIWULAN I 2025 IKU B

- Terbitnya Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:5-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan



- Peningkatan SDM



Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Operator komitmen belum menyelesaikan pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI karena aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2025	Penanggung Jawab
- Setiap penanggungjawab kegiatan agar melaporkan target dan capaian output setiap bulan paling lambat tgl 3 bulan berikutnya dengan mengisi link yang telah disiapkan. - Operator komitmen melakukan penginputan data target dan capaian output satker pada aplikasi SAKTI maupun modul komitmen	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan IV 2024	Penanggung Jawab
- PPK dan Tim pada TW I 2025 telah menyelesaikan kontrak : • Pengadaan jasa internet PT Indonesia Comnet Plus sampai pada tahap penandatanganan kontrak. Dan akan direalisasikan pengerjaan sampai pada tahap pembayaran pada TW II 2025 • Pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan 12 orang (sekretaris, pramubakti, petugas kebersihan, petugas keamanan, penyiap bahan uji mutu, dan petugas pelayanan informasi)	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 9 April 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit, S.PI

**Lampiran 9. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target							71,5		71,5
Realisasi									
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4th

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan AKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahunan berkenaan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

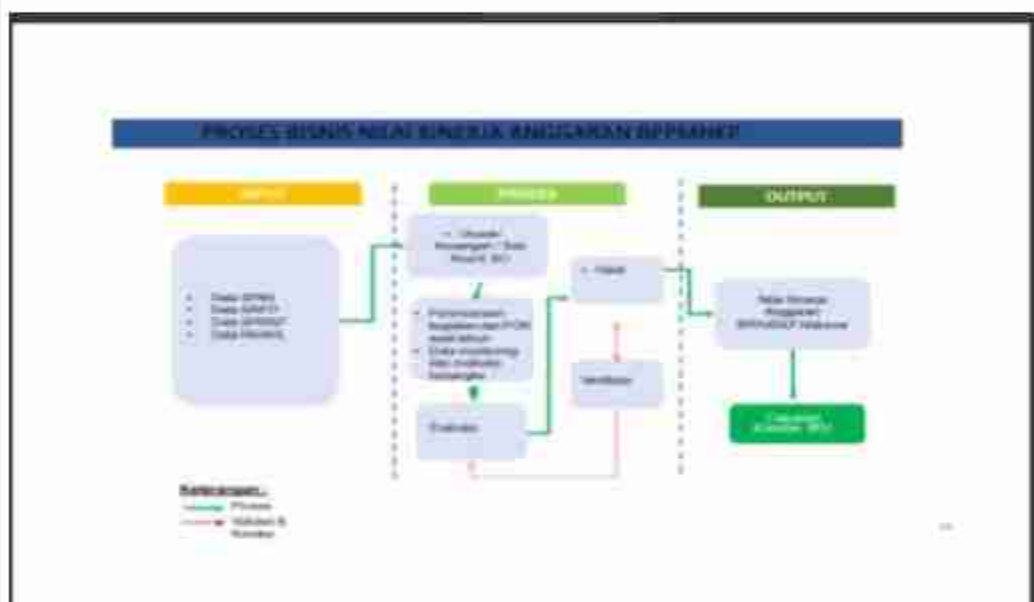
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran
- Rapat pembahasan penyusunan rencana aksi pelaksanaan anggaran tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 di BPPMHKP Makassar
- Rapat relokasi blokir anggaran tanggal 22 Januari 2025 yang dilaksanakan Sekretariat BPPMHKP

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 65,62 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 34,38 %

ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,-. Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 40.268.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 295.884.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 1.052.000,-. Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 142.480.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

PROGRAM NASIONAL

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asa cita.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum terinputnya capaian output karena pada aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2025	Penanggung Jawab
- Melakukan penginputan target dan capaian output bulan Januari sampai Maret 2025 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen; - Mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025; - Menindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW IV Tahun 2024	Penanggung Jawab
- Telah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025; - Telah menindaklanjuti hasil monitoring dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, April 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit, S.Pi

Dokumentasi Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 di BPPMHKP Makassar



Dokumentasi Rapat Relokasi Blokir Anggaran Pada Tanggal 24 Januari 2025 di selenggarakan oleh Sekretariat BPPMHKP

 A screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet. The spreadsheet has multiple columns and rows of data. The title bar of the window reads "Rencana Anggaran-Blokir-Aksi-Cas BPPMHKP". The data includes various numerical values and text entries.

 A screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet, similar to the one in the previous image. It shows a table with columns and rows of data. A video call window is overlaid on the right side of the spreadsheet, showing two participants in a meeting.

**Lampiran 10. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025.**

Nama Indikator (10)	:	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	100	100	100	100	100	100	100	-	100
Realisasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-
%Capaian	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern; Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut : $\% P = (A/B) \times 100\%$ Keterangan : % P = Persentase penyelesaian temuan; A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan; B = Nilai temuan BPK tahun 2024; Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024 pada Balai Besar KIPM Makassar oleh BPK RI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan temuan sebagai berikut :

No.	Uraian Penyetoran	Nomor dan Tanggal NTPN
1	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 6.770.700,-	No. 100F61QV3RR08M5. Tanggal 23 April 2024
2	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu sebesar Rp. 5.280.000,-	No. C1C023CfK4LPCAN Tanggal 23 April 2024
3	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 5.040.000,-	No. 9871D2G4VPi9C8J2 Tanggal 23 April 2024

Dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah :

$$\begin{aligned} \% P &= (A/B) \times 100\% \\ &= (17.090.700/17.090.700) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024, maka capaiannya sama yaitu 100%;

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 144.310.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 139.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Rp. 9.000.000,-;

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 20.622.161,- atau 17,41% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 12.906.110,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 7.716.051,-

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025	Penanggung Jawab
Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW IV Tahun 2024	Penanggung Jawab
Telah dilakukan internalisasi Kepmen KP Nomor 56 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN di lingkungan KKP pada tanggal 22 Januari 2025	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025
 Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Karwit

Dokumentasi : Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan internalisasi Kepmen KP Nomor 56 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN di lingkungan KKP pada tanggal 22 Januari 2025 BPPMHKP Makassar



**Lampiran 11. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (11)	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan 1

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target			81			87	87		87
Realisasi									
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat ke dalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	S1 / D-IV	DIII	DII / DI / SLTA / Setara	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1 / D-IV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	S1 / D-IV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1 / D-IV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Nilai Realisasi IP ASN Tahun 2024 adalah 90,78, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - Kualifikasi;
 - Kompetensi;
 - Kinerja; dan
 - Disiplin.
- Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - Pendidikan S-3 = -
 - Pendidikan S-2 :
 - S2 Keahlian : 7 orang
 - Pendidikan S-1 / D-IV :
 - S-1 / D-IV Keahlian : 12 orang
 - S-1 / D-IV Pengawas : 1 orang
 - S-1 / D-IV Pelaksana : 4 orang
 - Pendidikan D-III ;
 - D-III Keterampilan : 4 orang
 - D-III Pelaksana : 1 orang
 - SLTA :
 - SLTA Keterampilan : 1 orang
 - SLTA Pelaksana : 4 orang
- Berdasarkan Surat Pkt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-8M.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).
- Berdasarkan Surat Pkt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-8M.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
 - Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan

- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
- 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
- 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan

Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Non manajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi :	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BKKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. Hukuman disiplin ringan;
 - c. Hukuman disiplin sedang; dan

- d. Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemuktahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN;
 - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari aplikasi SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN;
 - Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN / rekonsiliasi data laporan kinerja ke SIASN BKN / data riwayat Kinerja pada SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori; dan
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:
- Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Berdasarkan Aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

$$IP \text{ ASN BBKIPM Makassar} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN BBKIPM Makassar}}{\text{Jumlah pegawai ASN BBKIPM Makassar}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai aktif yang berkedudukan hukum sebagai ASN, meliputi:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.
12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
 - a. Calon PNS (CPNS);
 - b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - c. Dipekerjakan (DPK); dan
 - d. Tugas Belajar dibayai

Capaian IP ASN Individu Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Capaian IP ASN Instansi Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dapat disajikan pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 34 Pegawai yang sebelumnya 37 pegawai yang pensiun (Hasbullah, S. St), mutasi ke Biro umum (Abdul Mubarak Azis, S.T, dan Poltek Bone (Ir. Anwar, M. Si)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
10.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
11.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
12.	Pelaksana	9
	Total	34

Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

Program Nasional

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Aspek Pemanfaatan

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak profesional dalam kaitan pelayanan publik.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Aplikasi My ASN dan SIASN di Triwulan I bermasalah sehingga usulan diklat/pelatihan pegawai tidak terlihat pada history pengajuan ASN sehingga pada Aplikasi SIASN tidak terbaca pada menu Inbox usulan.
- Efisiensi Anggaran berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai sehingga tidak dapat dilakukan pelatihan secara langsung.

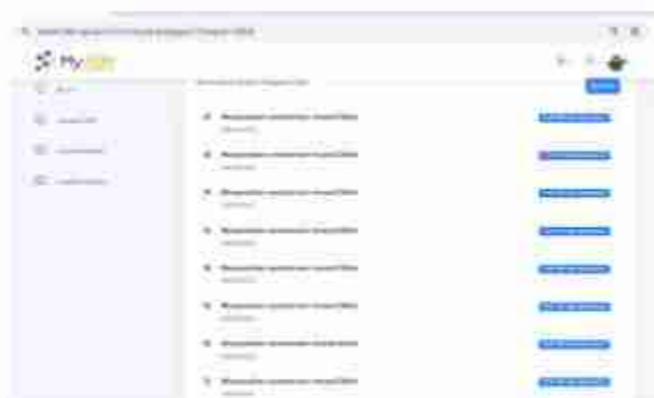
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Aparatur sipil negara mengikuti pelatihan secara daring	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1. Telah dilakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada <i>myasn.bkn.go.id</i> 2. Telah disampaikan kepada pegawai yang nilai kompetensi belum maksimal untuk mengikuti seminar/latihan untuk pengembangan kompetensi dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi <i>myasn.bkn.go.id</i>;	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit

FOTO KEGIATAN UPDATE DATA PADA APLIKASI KEPEGAWAIAN



History Pengajuan pelatihan Aparatur Sipil Negara MyAsn

No	Nama	Jenis Pelatihan	Status	Tgl Pengajuan	Tgl Penetapan	Tgl Pelaksanaan	Tgl Penyelesaian	Tgl Penyelesaian
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...

Monitoring usulan pelatihan Aparatur Sipil Negara pada aplikasi SIA5N

**Lampiran12. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	-						86		86
Realisasi									
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4th

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi.

Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen RKAKL dan Rencana Aksi yang telah terealisasi pada triwulan I mencapai 15 %

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2024 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30 %

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Pada Triwulan I sehingga terealisasi tercapai 3,75 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHPK, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal, sehingga realisasi tercapai 5% .

Bobot realisasi capaian :

Parameter 1 (15%) + parameter 2 (30%) + parameter 3 (3,7%) + parameter 4 (0%) = 48 %.

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target
= 48 % x 86
= 41,28

- Telah dilakukan rapat sesuai dengan memorandum Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.14/B8KIPM.MKS/TU.330/III/2025 pada tanggal 5 Maret perihal penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja.
- Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator Kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 26.498.000 dan terealisasi sebesar Rp 900.000 atau 7,22%
- Pada indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun yang diharapkan dengan penilaian mandiri sakipt tersebut dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar. Dengan tercapainya indikator kinerja ini diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan akuntabel sehingga dapat mendukung Program Prioritas KKP dan Program Prioritas Nasional.
- Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum Optimalnya capaian Kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Mengoptimalkan capaian kegiatan dan anggaran pada triwulan selanjutnya	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab

Telah menyampaikan laporan kinerja triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahunan pada aplikasi E-SAKIP Reviu tepat waktu	Tim Kerja Dukungan Manajerial
--	-------------------------------

Makassar, April 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit

DOKUMENTASI KEGIATAN



**Lampiran 13. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (13)	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100								
% Capaian	117,65								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Diskripsi :

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{JNB}{JN} \times 100\%$$

JNB = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti.

JN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan.

Kegiatan yang Dilakukan :

Pada triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode triwulan IV tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka nilainya sama yaitu 100%.

Anggaran :

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran semula Rp. 2.126.761.000,- setelah terkena kebijakan efisiensi menjadi Rp. 1.502.912.000,- yang sampai dengan triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 402.956.249,- atau 26,81% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 822.011.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 82,83%.

Sumberdaya Manusia :

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Program Nasional dan Pemanfaatan :

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Tercapainya target kinerja ini mencerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen. - Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode triwulan I Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit

Tampilan layar pada aplikasi SIDAK

<https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/9/373>



The screenshot shows a detailed data table within the SIDAK application. The table has multiple columns, including 'No', 'Nama', 'Alamat', 'No. Telp', 'Email', 'Status', and 'Catatan'. The data is organized into rows, and the table is presented in a clear, structured format. The background of the table is white, and the text is in black, making it easy to read.



**Lampiran 14. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim Kerja	:	Dukungan Majemen
Periode Laporan	:	Triwulan 1

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja (14)	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	76	-	-	-	-	-	76,00	-	76,00
Realisasi	99,06								
% Capaian	130,34								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?) Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya; 2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA- KL; 3. Mengecek kesiapan internet untuk mendukung upload ke dalam aplikasi SIRUP; 4. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
--

maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dan diumumkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 41 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 4.241.547.000,- (SIRUP awal) pada bulan Januari 2025
- b. Paket Penyedia sebanyak 20 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 2.114.307.000,- (SIRUP revisi) pada bulan Maret 2025
- c. Paket Swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-
- d. Paket Penyedia dalam swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar Rp. 65.566.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994.002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994.002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya diblokir sehingga nilainya menjadi Rp 0,-.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (Web based) adalah mendukung program nasional berupa efisiensi kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh bapak presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat program prioritas nasional melalui ASTA CITA

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
3. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
4. SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
5. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah ketidakcermatan operator SIRUP dalam melakukan penginputan data pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Meningkatkan pemahaman operator SIRUP melalui diskusi/ pelatihan/ sharing session	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, April 2025
Penanggung jawab Indikator Kinerja,

Karwit, S.Pi

1. SIRUP AWAL – 13-01-2025

BERAP RENCANA UMUM PENGADAAN	
TAHUN ANGGARAN : 2025	
SK/PPD:	Komisionaris Kelautan Dan Perikanan Bulan Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
Setoran Kerja:	
PAKIR:	Mohammed Zamrud, S.Pi., MP 596719021340000001

3. Paket Pengadaa

3.1. Paket Pengadaa Terumunikan

No	Uraian Pekerjaan	Unit Kerja	Volume	Unit Harga	Estimasi Biaya	Estimasi Waktu	Estimasi Biaya
1	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000
2	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000
3	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000
4	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000

Assessment Risiko dan Penilaian Hasil Berdasarkan Analisis Pengadaa Berdasarkan Data dan Informasi yang Tersedia

No	Uraian Pekerjaan	Unit Kerja	Volume	Unit Harga	Estimasi Biaya	Estimasi Waktu	Estimasi Biaya
1	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000
2	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000
3	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000
4	Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran (APK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar	Unit Kerja	10000	10000	1000000	10000	1000000

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–117

Projektnummer	Projekttitel	Projektziele	Projektbudget	Projektstatus	Projektverantwortlicher	Projektstart	Projektende
11	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
12	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
13	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
14	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
15	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
16	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
17	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
18	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
19	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%
20	Finanzierung des Projektes Finanzierung des Projektes	Finanzierung des Projektes	100.000	100%	100%	100%	100%

[illegible][illegible]

3.2. Dual Fuzzy Morphisms

2011年11月11日

1.2. Oral Paket Penyedia

No	Anggaran	Saldo KPP	Saldo Paket	Saldo Sisa	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo

2. Paket Swastakelola

2.1. Paket Swastakelola Terumumkan

No	Anggaran	Saldo KPP	Saldo Paket	Saldo Sisa	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo

2.2. Oral Paket Swastakelola

No	Anggaran	Saldo KPP	Saldo Paket	Saldo Sisa	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo

3. Paket Penyedia Dalam Swastakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swastakelola Terumumkan

No	Anggaran	Saldo KPP	Saldo Paket	Saldo Sisa	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo

3.2. Oral Paket Penyedia Dalam Swastakelola

No	Anggaran	Saldo KPP	Saldo Paket	Saldo Sisa	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo

SiRUP

No	Indikator Kinerja	Nama Indikator	Penyediaan KPP				Saldo KPP
			Anggaran	Paket Swastakelola	Saldo	Saldo KPP	
1	10	Anggaran swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
2	20	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
3	30	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
4	40	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
5	50	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
6	60	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
7	70	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
8	80	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
9	90	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00
10	100	Anggaran swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	...	100.000,00	100.000,00

Saldo KPP: Saldo KPP swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola

Saldo KPP: Saldo KPP swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola

Saldo KPP: Saldo KPP swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola Swastakelola

**Lampiran 15. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (15)	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Timja Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian 2025	Target 2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	-	-	-	-	-	75	75	-	75
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Tw.1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;
 Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2;
 Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4;
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Deskripsi :

- Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
- Balai Besar KIPM Makassar telah memperoleh predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2022 sesuai Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.420/ITJ.5/HP.550/XI/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar KIPM Makassar, diperoleh nilai total sebesar 82,24 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 43,49 (Pemenuhan 21,40 dan Reform 22,09) dan Komponen Hasil sebesar 38,75. Nilai secara total telah memenuhi ambang batas menuju WBK, namun terdapat tiga area di Komponen Pengungkit (satu area pada Pemenuhan yaitu Penataan Tata Laksana dan dua area pada Reform yaitu Penataan Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen SDM) yang tidak mencapai ambang batas 60%;
- Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

Kegiatan yang Dilaksanakan :

- Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :
 - (a) Pertemuan pembahasan pemenuhan dokumen penerapan WBK pada tanggal 20 Februari 2025;
 - (b) Penyusunan dokumen penerapan WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
 - (c) Penetapan tim kerja pembangunan WBK sesuai surat tugas Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.325/BBKIPM.MKS/OP.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
 - (d) Pemenuhan kepatuhan penyampaian LHKPN sebanyak 8 orang dan SPT Tahunan sebanyak 37 orang;
 - (e) Penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai (ASN, PPNP dan PJLP);
 - (f) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - (g) Penerbitan surat dan memorandum himbauan tidak menerima gratifikasi pada momen hari raya keagamaan dan penyampaiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - (h) Penandatanganan berita acara tuntas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 25 Maret 2025;
 - (i) Melakukan bincang inspiratif bertema pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh seluruh pegawai pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber: Mohammad Zamrud, S.Pi., MP;
 - (j) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan neon box, perbaikan running text, dan pengaktifan announcement menjaga integritas;
- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
 - (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - (3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
 - (4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15,00;
 - (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya Manusia :

- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 58 orang, yang terdiri dari ASN 34 orang dan non ASN 24 orang;

Anggaran :

- Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi, anggarannya menjadi Rp. 0,-.

Program Nasional :

- Penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendukung tercapainya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yang meliputi (1) pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, (2) ekonomi biru berkelanjutan, (3) swasembada pangan, (4) peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan, dan (5) pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan; disamping itu juga dapat mendukung terwujudnya program nasional Asta Cita yang menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045;

Aspek Pemanfaatan :

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK/WBBM pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
 - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
 - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
 - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
 - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;

(g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran;

Akar Masalah (Mengapa Hal Tersebut Terjadi ?)

Keterlambatan verifikasi dokumen implementasi zona integritas WBK menuju WBBM dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Berikutnya	Penanggung Jawab
- Masing-masing penanggung jawab unsur menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan; - Tim sekretariat melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK sebelum divalidasi oleh Pjt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025
Penanggung Jawab Indikator Kinerja,

Karwit

Dokumentasi Kegiatan :



[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 495–504

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

100. ¹ *Rechtschreibregeln für die deutsche Sprache*, 1996, 2002, 2006, 2009, 2012, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691,

[illegible]

1. *Identifikasi masalah* yang secara eksplisit dan terintegrasi dengan isi materi dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan bahasa yang menarik, menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

DOI: 10.1002/for

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Source: *Journal of Management Education*, 20(1), 1996, pp. 10-11. Copyright 1996 by Sage Publications, Inc. All rights reserved. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

Summary: While some have suggested that African, U.S., and European (EU) countries and regions have developed similar trends in the presence of HIV/AIDS, some researchers have argued that Africa has the highest HIV/AIDS prevalence rates, while Europe has the lowest. This paper compares HIV/AIDS prevalence rates between Africa and Europe, and finds that while Africa has the highest prevalence rates, Europe has the lowest. The paper also finds that the prevalence rates in Africa and Europe are both increasing, but at different rates. The paper concludes that while Africa has the highest prevalence rates, Europe has the lowest, and that the prevalence rates in both regions are increasing.

State	State, Jan. 2000
-------	------------------

- [illegible]

- [illegible]

Received: 10 May 2019; revised: 10 May 2019; accepted: 10 May 2019
 Published online: 10 May 2019

© 2000 Blackwell Science Ltd

¹ <http://www.fishbase.org>



© 2000 Blackwell Science Ltd

DOI: 10.1002/ajim.20001
Page: 1
Page: 1
Page: 1
Page: 1

With its state-of-the-art equipment, the 100,000-sq-ft facility is designed to meet the needs of the most demanding customers. The facility is designed to meet the needs of the most demanding customers. The facility is designed to meet the needs of the most demanding customers.

Buy 100 mg for 10% off any 100 mg purchase. Minimum purchase 100 mg. Offer good on all 100 mg purchases. Offer good on all 100 mg purchases. Offer good on all 100 mg purchases.

Storage up to 1000GB, 1000GB, 1000GB, 1000GB, 1000GB

0000-0001-9300-0000

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

**Lampiran 16. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator:	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target							1		1
Realisasi									
% Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :

- Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

a. Penggunaan teknologi

1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah
2. Menggunakan teknologi mobile
3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE.

Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.

- Verifikasi biometric
 - Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
 - Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital
 - Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem membandingkan data biometrik baru dengan template yang sudah disimpan
 - Verifikasi biometrik lebih aman dibandingkan dengan metode tradisional seperti PIN atau kata sandi
- Single Sign On (SSO)
 - Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
 - SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
 - SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
 - Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna
- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan public

b. Pelatihan

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

c. Kolaborasi

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta

3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Morning briefing petugas layanan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- b. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bpk Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P menjadi nara sumber pada kegiatan Forum Peningkatan Kapasitas UMKM pengolahan hasil perikanan tanggal 3 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Hal ini mendukung implementasi/ inovasi layanan legal ekspor UMKM
- c. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai (ASN, PPNNP dan PJLP) tanggal 3 Februari 2025
- d. Rapat penyusunan proposal inovasi pelayanan publik tanggal 3 Februari 2025 dengan tema/kategori pemerataan ekonomi/ penguatan UMKM yang berfokus pada layanan legalitas ekspor UMKM lingkup Sulawesi Selatan.
- e. Bincang inspiratif pengendalian gratifikasi di lingkup Badan Mutu KKP Makassar pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar

Pelaksanaan kegiatan dengan metode pelatihan/ bincang inspiratif/ sharing session diharapkan mampu meningkat kualitas layanan serta mampu :

- Membentuk pegawai berintegritas:
Pegawai menolak gratifikasi dan memahami bahaya penerimaan gratifikasi
- Membentuk citra positif instansi:
Instansi bebas dari korupsi dan memiliki kredibilitas
- Mendukung lingkungan bebas korupsi:
Instansi memiliki budaya anti gratifikasi dan lingkungan pengendalian yang kondusif
- Meningkatkan kepercayaan publik :
Masyarakat memperoleh layanan tanpa gratifikasi, suap, dan pemerasan

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 60 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNNP/PJLP sebanyak 24 pegawai.

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu awal sebesar Rp.33.777.000, menjadi sebesar Rp.3.600.000. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 633.500,- atau sebesar 17,60%.

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :

- **Meningkatkan kualitas layanan**
Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.
- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**
Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu**
Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.
- **Memperiapkan menghadapi perubahan**
Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.
- **Menjawab kebutuhan masyarakat**
Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Petugas pelayanan kurang update pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap regulasi dan standar pelayanan publik terkini.

Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2025	Penanggung Jawab
Agar seluruh pegawai dapat meningkatkan skill atau keterampilan dalam peningkatan pelayanan public dengan mengikuti pelatihan/ diklat / sharing session/ bincang inspiratif dibidang pelayanan publik dan peningkatan integritas pegawai	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan IV 2024	Penanggung Jawab
Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik baru dilaksanakan di tahun 2025 sehingga belum ada rekomendasi rencana aksi sebelumnya di triwulan IV 2024	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Penanggung Jawab Indikator Kinerja

Karwit, S.Pi

LAMPIRAN KEGIATAN

Bincang Inspiratif Pengendalian Gratifikasi
di Lingkup Badan Mutu KKP Makassar



**Lampiran 17. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	88	88	88	88	88	88	88		88
Realisasi	93,32								
%Capaian	106,04								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 9 (Sembilan) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
3. **Jasa pengujian** hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
5. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
6. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
7. Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
8. Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
9. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$n = \frac{X^2 NP (1-P) d^2}{(N-1) + X^2 P (1-P)}$$

X = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana df = 1 dan α = 5% = 0,05
P = Perkiraan proporsi populasi (jika tidak diketahui maka P = 0,5)
N = Jumlah Populasi
d = tingkat toleransi kesalahan (0,05)

$$n = \frac{3,841 \times 48 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05^2 \times 47) + (3,841 \times 0,5 \times 0,5)}$$

$$n = \frac{46,092}{1,000} = 46,092 \approx 47$$

Responden	Nilai	Bobot	Hasil	Bobot	Hasil
1	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
2	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
3	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
4	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
5	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
6	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
7	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
8	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
9	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
10	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
11	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
12	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
13	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
14	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
15	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
16	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
17	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
18	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
19	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
20	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
21	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
22	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
23	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
24	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
25	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
26	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
27	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
28	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
29	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
30	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
31	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
32	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
33	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
34	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
35	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
36	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
37	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
38	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
39	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
40	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
41	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
42	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
43	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
44	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
45	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
46	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
47	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
48	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
49	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
50	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
51	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
52	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
53	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
54	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
55	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
56	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
57	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
58	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
59	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
60	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
61	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
62	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
63	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
64	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
65	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
66	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
67	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
68	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
69	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
70	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
71	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
72	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
73	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
74	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
75	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
76	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
77	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
78	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
79	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
80	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
81	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
82	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
83	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
84	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
85	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
86	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
87	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
88	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
89	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
90	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
91	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
92	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
93	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
94	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
95	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
96	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
97	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
98	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
99	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111
100	93,32	0,1111	10,2655	93,32	0,1111

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2.798 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 338 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 197, hal ini tidak memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Kurangnya jumlah responden di Balai Besar KIPM Makassar salah satunya disebabkan adanya kegiatan pelayanan secara virtual terkait kebijakan efisiensi anggaran sehingga penyampalan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tidak berjalan secara optimal. Serta pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Ada beberapa jenis layanan yang belum diberikan ke pengguna jasa karena penambahan jenis pilihan layanan pada aplikasi tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

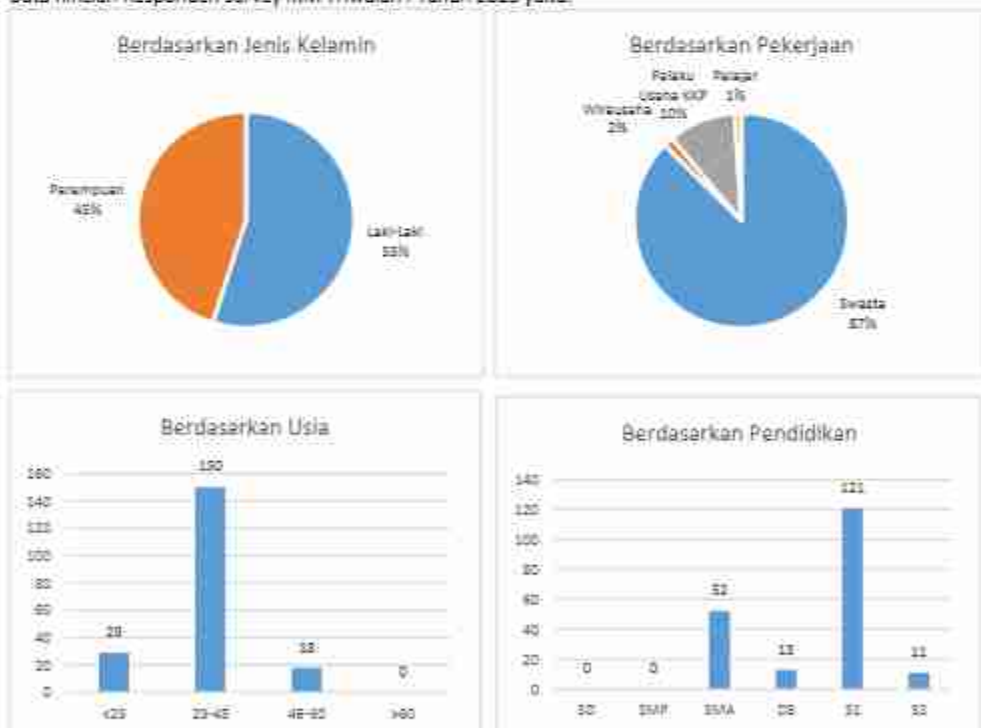
Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 197 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,72 atau sebesar 93,32 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 106,04%. Apabila data Hasil IKM Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan TW I Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Perubahan
----	-----------------	-----------------------	-----------

		Triwulan IV - 2024	Triwulan I - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3,750	3,733	↓
2	Kemudahan prosedur	3,757	3,731	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,755	3,724	↓
4	Kesesuaian biaya	3,787	3,711	↓
5	Kesesuaian produk	3,755	3,741	↓
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,738	3,706	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,775	3,716	↓
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,812	3,746	↓
9	Kualitas isi/sarana	3,785	3,706	↓
	Nilai IKM	94,20	93,32	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2025 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kualitas isi/ sarana serta unsur kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan

perbaikan untuk unsur kualitas isi/ sarana serta unsur kecepatan respon walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline selanjutnya mengalami perubahan aplikasi menjadi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini kadang mengalami kendala. Serta aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami peningkatan dari 91,60 menjadi 93,32. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan IV pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami penurunan dari 94,20 menjadi 93,32. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan IV Tahun 2024 ke Triwulan I 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Selama masa transisi aplikasi ini petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan I Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" kepada Balai Besar KIPM Makassar pada Tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 6 Maret 2025. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat adalah dengan mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP pada tanggal 10 s.d. 13 Maret 2025 secara daring.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
6.	PPNPN	12
7.	PJLP	12
	TOTAL	42

Anggaran

Pada tahun 2024 terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 379.200.000,-. Hingga Triwulan I tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 92.578.921,- pada langganan daya dan jasa, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 286.621.079,-.

Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita.

Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu kurang konsisten menyampaikan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa setelah memberikan layanan.

Pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu belum memutakhirkan pengetahuan mengenai isi survey dan standar pelayanan terbaru Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk meningkatkan jumlah responden kepada pengguna layanan.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIAPMutu dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 kepada petugas layanan dan pengguna jasa.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

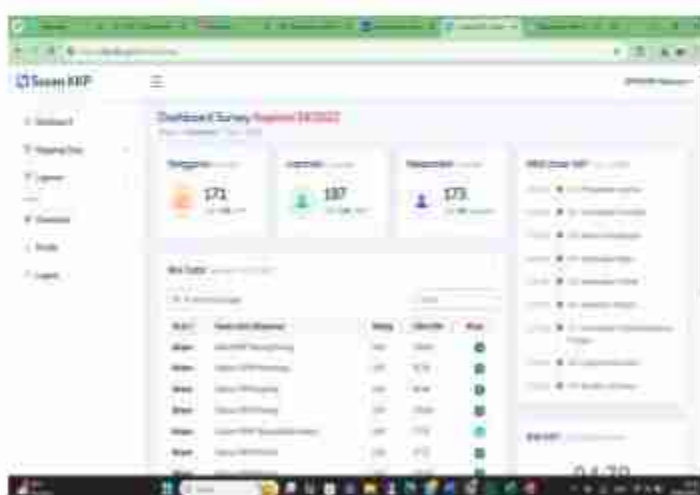
Makassar, 10 April 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit:

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2025



Infografis Nilai IKM Triwulan I Tahun 2025



Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP

IKM	Nilai	No	IKM	Nilai	IKM	Nilai
IKM1	100	1	IKM2	100	IKM3	100
IKM4	100	2	IKM5	100	IKM6	100
IKM7	100	3	IKM8	100	IKM9	100
IKM10	100	4	IKM11	100	IKM12	100
IKM13	100	5	IKM14	100	IKM15	100
IKM16	100	6	IKM17	100	IKM18	100
IKM19	100	7	IKM20	100	IKM21	100
IKM22	100	8	IKM23	100	IKM24	100
IKM25	100	9	IKM26	100	IKM27	100
IKM28	100	10	IKM29	100	IKM30	100

Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan nilai IKM Triwulan I Tahun 2025

Survey Kepuasan Masyarakat
Jenis: Data Sekunder KKP Pakseur

Isi survey

Isi observasi

Isi wawancara

Isi dokumentasi

Isi lain-lain

Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP

**DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN I TAHUN 2025**



**DOKUMENTASI BRIEFING PETUGAS PELAYANAN
TRIWULAN I TAHUN 2025**



**DOKUMENTASI AKSELERASI LAYANAN SERTIFIKASI, BADAN MUTU KKP MAKASSAR SOSIALISASI APLIKASI
SIAP MUTU KEPADA PELAKU USAHA**





Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik lingkup Badan Mutu KKP

10-13 Maret 2025

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SIAP MUTU UNTUK NEGARA TUJUAN CHINA



DOKUMENTASI PENDAMPINGAN PENGGUNA JASA MENGISI DATA EKSPOR PADA APLIKASI SIAP MUTU





PENGHARGAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KATEGORI INFORMATIF



